

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HUTAN DESA DI SEGMENT TENGAH
DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**

(Studi Kasus : Pembangunan Hutan Desa di DAS Babon, Kota Semarang)



TESIS

**Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Lingkungan**

Oleh :

SURYANTO EDI SETIYONO

L4K 001091

**MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2004

"Jikalau besok hari kiamat telah tiba,
dan ditanganmu ada tanaman yang dapat ditanam,
maka tanamlah,
dengan demikian engkau akan mendapat pahala"
(Hadits Riwayat Imam Ahmad)

Jika Anda Berencana Satu Tahun Ke Depan
Tanamlah Benih
Jika Anda Berencana Sepuluh Tahun Ke Depan
Tanamlah Pohon
Jika Anda Berencana Seratus Tahun Ke Depan
Didiklah Anak-Anakmu untuk Mencintai Lingkungan

Untuk :
Negara dan almamaterku
bapak, ibu tercinta, istri tersayang (Trin)
anak-anakku tercinta (Dito & Tio)
dan saudaraku semua

TESIS

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HUTAN DESA DI SEGMENT TENGAH DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

(Studi Kasus : Pembangunan Hutan Desa di DAS Babon, Kota Semarang)

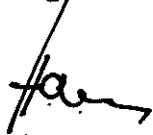
Disusun oleh :

Suryanto Edi Setiyono
L4K001091

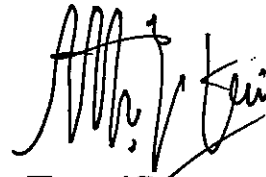
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 10 Februari 2004
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,

Pembimbing I
Pembimbing II



Dr. Tukiman Taruna



Dra. Hartuti Purnaweni, MPA



Ketua Program
Magister Ilmu Lingkungan,


Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES

TESIS

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HUTAN DESA DI SEGMENT TENGAH DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) (Studi Kasus : Pembangunan Hutan Desa di DAS Babon, Kota Semarang)

Disusun oleh :
Suryanto Edi Setiyono
L4K001091

Penguji I


Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES

Penguji II


Dr. Boedi Hendrarto, Msc

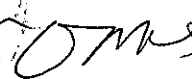
Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. Tukiman Taruna

Pembimbing II


Dra. Hartuti Purnaweni, MPA


**Ketua Program
Magister Ilmu Lingkungan,**

Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES

ABSTRAK

Permasalahan penelitian digali dari strategi pengelolaan lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Babon, Kota Semarang. Selama ini yang dilakukan belum menyentuh kepentingan masyarakat lokal (setempat), sehingga rasa memiliki program tidak ada di masyarakat. Hal ini merupakan salah satu penyebab tidak berlanjutnya program yang telah dilaksanakan, melalui pendekatan partisipatif diharapkan dapat tumbuh dan berkembang kelembagaan pengelolaan lingkungan di masyarakat secara mandiri.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pencapaian keberhasilan pengelolaan lingkungan partisipatif terhadap pengembangan masyarakat dalam program pengelolaan DAS melalui pembangunan hutan desa dan mengidentifikasi aspek-aspek yang mempengaruhi penguatan kelembagaan pengelola lingkungan di masyarakat segmen tengah DAS Babon.

Pada studi ini digunakan *purposive sampling*, berdasarkan program pembangunan hutan desa untuk wilayah tengah DAS Babon di 3 (tiga) kelurahan : Kelurahan Bulusan, Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Rowosari. Metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif, didukung oleh hasil *Focus Group Discussion* (FGD) maupun wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap tokoh masyarakat (*key persons*) yang terlibat dalam program pembangunan hutan desa. Metode pembobotan dengan skala Likert digunakan dalam analisa pemetaan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Metode tersebut sangat relevan untuk menilai indikator kunci keberhasilan perencanaan partisipatif. Kunci keberhasilan perencanaan partisipatif di masyarakat dapat terlihat pada tangga pemberdayaan, pada tingkat tangga mana masyarakat tersebut berada.

Hasil studi penelitian menunjukkan adanya perbedaan partisipasi di 3 (tiga) daerah penelitian. Ada lima aspek yang mempengaruhi yaitu aspek manajemen dan organisasi, hukum dan peraturan, pembeayaan, teknis operasional serta partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang diwakili oleh kelompok tani tertinggi ada di Kelurahan Bulusan, selanjutnya Kelurahan Rowosari kemudian Kelurahan Meteseh. Perbedaan tingkat partisipasi ini disebabkan oleh seberapa solidnya kelompok masyarakat itu terbentuk. Mengingat Sungai Babon adalah sumberdaya alam yang memiliki skala luas menyebabkan beragamnya karakteristik potensi dan permasalahan antara segmen.

Adapun prospek penerapan pengelolaan partisipatif di ketiga wilayah yang berbeda segemen tengah DAS Babon untuk Kelurahan Bulusan tergolong baik, sedangkan untuk Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Rowosari cukup. Secara umum relatif baiknya prospek manajemen partisipatif menjadi dasar kuat bagi Bapedalda untuk melakukan evaluasi program pengelolaan lingkungan yang berbasis kepada pemberdayaan masyarakat.

Model manajemen partisipatif yang dikembangkan tetap memiliki satu kerangka yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Hasil yang diharapkan dari pengembangan model tersebut ialah pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberdayaan *stakeholder*, perlindungan alam dan penegakan hukum lingkungan dalam kerangka pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Agar tercipta keberlanjutan manajemen partisipatif maka posisi partisipasi masyarakat diharapkan lebih dominan daripada pemerintah.

ABSTRACT

Strategy in managing of Babon Watershed in Semarang encouraged the writer to conduct this research. So far, it has not touched the needs of the local community and caused the unsustainable of this strategy implementation. Through participation approach, the writer expects that the consciousness of the local community to manage the watershed environment could be developed.

The goals of the research are to formulate successful strategy in participatory environmental management in the watershed management through village forest plantation program, as well as to identify several aspects that influence the strengthening process of the community in the central segment of Babon river basin area.

Purposive sampling was applied in the study based on village forest plantation program in the middle segment of Babon Watershed, which consist of 3 (three) villages (Bulusan, Meteseh and Rowosari) Qualitative and Quantitative approach method was , supported by Focus Group Discussion (FGD) as well as in-depth interview with community leaders as the key persons involved in the program. Scoring method with Likert scale was used in mapping community participation level in environmental management. The method is relevant to evaluate success key indicator of participatory planning which could be observed through the level of empowerment stages.

The results of this study indicate different level of participation at the 3 (three) survey areas, influenced by 5 aspects, i.e. : management and organization, law and rules, project funding, technical operation and community/ people participation. The highest level of people/ community participation represented by the farmer group is shown in Bulusan villages, followed by Rowosari and Meteseh. The difference level of participation is affected by the solidity of the community group. The Babon River as a natural resource with a broad scale, has various characteristics and potencies. Regarding the prospect of participatory management application it is considered that among those 3 (three) areas in the central management of Babon river basin area, the Bulusan villages is good, while the other two (Meteseh and Rowosari) are adequate. In general, participatory management is actually a strong platform for Environmental Impact Management Agency (BAPEDALDA) in evaluating environmental management program with community empowerment basis.

A suggested participatory management model might be further expanded to empower the local peoples economy, the stakeholders to conserve natural resources and the enforce environmental law for the source of sustainable environmental management. By maintaining participatory management the writer expects that people participation in handing environmental development will be more dominant than the government in the future.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas anugrah dan rahmatnya hingga selesainya pembuatan tesis ini. Tesis ini diberi judul : “Pengelolaan Lingkungan Hutan Desa Di Segmen Tengah Daerah Aliran Sungai (DAS)”, (studi kasus : Pembangunan Hutan Desa di DAS Babon, Kota Semarang).

Proses pembelajaran dalam membangun partisipasi masyarakat melalui kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup banyak diperoleh berkat dorongan, motivasi dari pembimbing, keluarga dan teman-teman yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Penulis menyampaikan terima kasih, rasa hormat dan penghargaan kepada :

- Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES, selaku Ketua Program Magister Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang;
- Dr. Tukiman Taruna dan Dra. Hartuti Purnaweni, MPA, selaku pembimbing dengan penuh pengertian dan ketulusan hati memberikan bimbingan dengan sabar;
- Bapak Walikota Semarang yang memberikan kesempatan untuk mengikuti program Pasca Sarjana Magister Ilmu Lingkungan;
- Bapak Kepala Bapedalda Kota Semarang yang telah memberikan toleransi;
- Bapak, Ibu dan semua keluarga tercinta yang telah memberikan semuanya sehingga mampu memotivasi;
- Istri tercinta Dra. Trin Supatriawati, anakku Dito, Tio yang penuh keikhlasan dapat memberikan inspirasi sepanjang masa;
- Seluruh teman-teman di lingkungan kampus dan kantor Bapedalda Semarang yang telah memberikan semangat.

Penulisan ini tentunya masih banyak kekurangannya, namun harapan penulis hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya.

Semarang, 10 Februari 2004

Penulis

Suryanto Edi Setiyono

DAFTAR ISI

	hal.
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Telaah Kepustakaan	9
2.1.1. Perencanaan Pengelolaan Lingkungan : Konsep Teori dalam Perspektif Partisipatif	9
2.1.2. Partisipasi Masyarakat	12
2.1.3. Manajemen Partisipasi	12
2.1.4. Kelembagaan Masyarakat	14
2.1.5. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	14
2.1.6. Evaluasi Program	18
2.2. Kerangka Pemikiran	18
2.3. Definisi Konseptual	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Rancangan Penelitian	21
3.2. Ruang Lingkup	21
3.3. Lokasi Penelitian	21
3.4. Variabel yang diamati	22
3.5. Sumber Data	22
3.6. Metode Pengumpulan Data	22
3.7. Teknik Analisis	23
3.8. Waktu Penelitian	25

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.	Gambaran Umum Kondisi Fisik Segmen Tengah DAS Babon	26
4.1.1.	Pemanfaatan Sungai Babon	27
4.2.	Kondisi Sosial Masyarakat Segmen Tengah DAS Babon ..	28
4.3.	Kondisi Ekonomi Masyarakat Segmen Tengah DAS Babon	29
4.4.	Pembangunan Hutan Desa Segmen Tengah DAS Babon ...	30
4.4.1.	Tahap Perencanaan Program	31
a.	Sosialisasi Pembangunan Hutan Desa	32
b.	Penyusunan Desain Kegiatan	34
c.	Pembentukan Kelompok Tani	36
d.	Penentuan Lokasi	36
e.	Penetapan Bagi Hasil	38
4.4.1.1.	Persepsi Masyarakat dalam Perencanaan Program	39
4.4.1.2.	Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Program	40
A.	Keberhasilan Perencanaan Partisipatif	41
B.	Kendala Perencanaan Partisipatif	42
4.4.2.	Tahap II Pelaksanaan Kegiatan	42
4.4.2.1.	Persepsi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan	43
4.4.2.2.	Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan	44
A.	Keberhasilan Pelaksanaan Partisipatif	44
B.	Kendala Pelaksanaan Partisipatif	45
4.4.3.	Tahap III Monitoring dan Evaluasi	46
A.	Keterlibatan Masyarakat dalam Monitoring Evaluasi	46
B.	Hasil Monitoring dan Evaluasi	48
4.4.4.	Evaluasi Program Pembangunan Hutan Desa	48
4.4.5.	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	50
4.4.5.1.	Aspek Hukum dan Peraturan	50
4.4.5.2.	Aspek Manajemen dan Organisasi	50
4.4.5.3.	Aspek Pembiayaan	51
4.4.5.4.	Aspek Teknis Operasional	51
4.4.5.5.	Aspek Partisipatif	52
4.4.5.6.	Strategi Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Partisipatif	52
4.4.6.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	55
4.4.7.	Penguatan Kelembagaan dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	55
4.4.8.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	58
4.4.9.	Pemberdayaan Stakeholders	58
4.5.0.	Perlindungan Alam dan Sumberdaya	59
4.5.1.	Penegakan Hukum Lingkungan	59

4.6.	Keterbatasan Penelitian	59
4.6.1.	Keterbatasan Metodologis	60
4.6.2.	Keterbatasan Mancapai Outcome Manajemen Partisipatif	60
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	KESIMPULAN	61
5.2.	SARAN	62
	DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

1. TABEL 1 Pembobotan	25
2. TABEL 2 Wilayah Kelurahan di DAS Babon	27
3. TABEL 3 Manfaat Sungai Babon Terhadap Penduduk di Segmen tengah	28
4. TABEL 4 Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharaan	29
5. TABEL 5 Komposisi Penghasilan Responden	30
6. TABEL 6 Kesimpulan Diskusi Kelompok Petani	33
7. TABEL 7 Hasil Kesepakatan	35
8. TABEL 8 Peran Pemerintah dan Masyarakat	35
9. TABEL 9 Lokasi Pembangunan Hutan Desa	37
10. TABEL 10 Pembagian Hasil Penanaman Jati Super	38
11. TABEL 11 Tahap Perencanaan Pogram	39
12. TABEL 12 Tahap Pelaksanaan Program	43
13. TABEL 13 Evaluasi Pelaksanaan	49

DAFTAR DIAGRAM

1. Diagram 1. Alur Pikir	19
2. Diagram 2. Model Perencanaan Partisipatif	57

DAFTAR LAMPIRAN :

1. Peta Kecamatan Tembalang Batas Lokasi Penanaman Jati Super;
2. Daftar Kuesioner Masyarakat;
3. Daftar Kuesioner Tersetruktur "Key Persons".
4. FOTO : Kegiatan Pembangunan Hutan Desa Segmen Tengah DAS Babon Kota Semarang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Sumberdaya lahan, hutan dan air merupakan kekayaan vital dan sumber hajat hidup manusia sepanjang masa. Sumberdaya alam ini berada dalam kondisi terbatas baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu setiap upaya pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan pembangunan haruslah berwawasan lingkungan, sehingga fungsi dan perannya dapat dijaga dan dilestarikan. Hal ini perlu dilaksanakan agar pemenuhan kebutuhan akan sumberdaya alam tersebut tidak menyebabkan kerusakan.

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai bagian dari pembangunan wilayah pada hakekatnya merupakan optimalisasi dan konservasi sumber daya alam untuk memenuhi berbagai kepentingan. Pengelolaan DAS diartikan sebagai upaya manusia di dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia dan segala aktifitasnya, sehingga terjadi keserasiaan ekosistem serta dapat meningkat kemanfaatannya bagi manusia (Tarumingkeng, 2000). Akan tetapi sampai saat ini pengelolaan DAS masih menghadapi berbagai masalah yang kompleks dan saling terkait, seperti : degradasi hutan, lahan kritis, erosi, pencemaran air, banjir, kekeringan, sedimentasi serta masuknya material yang terlarut dalam sistem aliran air, dan lain sebagainya. Semua terkait dengan belum diperhatikannya prinsip kelestarian dan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan kurang diperhatikannya aspek konservasi dalam pemanfaatan tataguna lahan yang berdampak pada terganggunya siklus hidrologi.

Bab III Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan dalam ayat (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan; ayat (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan pasal 6 tersebut terkandung makna bahwa semua pihak diharapkan mempunyai tanggung jawab dalam melestarikan lingkungan hidup demi generasi yang akan datang. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan pada (ayat 1) di atas dilakukan dengan cara :

- a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. Memberikan saran pendapat;
- e. Menyampaikan informasi dan/ atau menyampaikan laporan.

Partisipasi dari masyarakat menuntut adanya masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang mandiri dan kuat. Untuk inilah maka diperlukan usaha penguatan kelembagaan masyarakat. Kaitan dengan penguatan kelembagaan masyarakat, program pemulihan kualitas lingkungan DAS Babon melalui pembangunan hutan desa dilaksanakan dalam bentuk perencanaan pengelolaan lingkungan yang partisipatif, dengan pendekatan manajemen partisipatif.

Manajemen partisipatif memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam rangka penyusunan program yang relevan, perencanaan yang realistis, pelaksanaan program yang memberikan manfaat, dan pengambilan keputusan (Gilbet & Ward, 1984). Pembangunan hutan desa merupakan bentuk upaya yang tepat guna menyalurkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pengembangan maupun aktifitas di dalamnya. Implementasi manajemen partisipatif dalam kegiatan pembangunan hutan desa ini dimulai dari tahapan sosialisasi program, sampai dengan kegiatan monitoring dan pemeliharaan tanaman.

Dalam sistem pengelolaan lingkungan, kita mengenal adanya hubungan ketergantungan antara pihak-pihak yang saling terkait, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karenanya pelaksanaan pengelolaan tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak yang berada dalam sistem tersebut, sehingga perlu untuk memberdayakan semua pihak terkait (Retno Soetaryono, 1994).

Menurut Ginanjar (1994), Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan dengan pembangunan masyarakat (*community development*). Pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya membangun masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya sesuai dengan pernyataan Kusbiantoro (1998) yang mengatakan bahwa :

“...meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara efektif dan efisien perlu kiranya terlebih dahulu ditumbuhkan rasa kepercayaan pada masyarakat, sehingga akan tercipta suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*)...”.

Oleh karena itu dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, menurut Kusbiantoro, (1988), perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Upaya pemberdayaan masyarakat harus terarah, langsung melibatkan masyarakat yang menjadi sasaran, dan program dirancang untuk mengatasi masalah sesuai kebutuhan masyarakat. Kemampuan masyarakat dapat ditingkatkan dengan memberikan dan mendorong adanya pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan upaya pemantauan dan pengawasan lingkungan;
2. Pendekatan kelompok sesuai dengan karakter sosial budaya (misalnya : guru, ulama, karang taruna, petani, pekerja pabrik dll). Hal ini dilaksanakan agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memecahkan permasalahan permasalahan yang mereka hadapi. Partisipasi masyarakat merupakan proses dimana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan tentang program kebijakan. Pentingnya partisipasi masyarakat itu didasarkan atas beberapa alasan yaitu : *Pertama* masyarakat berhak mengetahui tentang setiap rencana pembangunan yang secara potensial mempengaruhi kehidupan mereka. *Kedua*, masyarakat adalah *local expert* tentang lingkungan di sekitarnya sehingga layak didengar pendapat dan gagasannya agar program dan proyek yang akan dilakukan berdaya guna. *Ketiga* keberlanjutan dari program dan proyek serta kebijakan yang dihasilkan akan terjamin jika masyarakat diikutsertakan (Hadi, 1999).

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses membuat orang atau masyarakat saling memberikan atau memperoleh kekuatan dari yang lain, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun masyarakat. Upaya mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta mengembangkan kemandirian masyarakat, mereka mampu berperan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan lingkungan, serta mengambil bagian dalam keputusan-keputusan penting yang menyangkut dirinya (Checkoway, 1995).

Sasaran pemberdayaan akan lebih diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat secara optimal, sehingga pemerintah dapat bertugas sebagai pemberdaya/ pemampu dengan mendudukkan masyarakat sebagai pelaku yang diberdayakan dan pemerintah sebagai fasilitator. Masyarakat lokal ikut terlibat sejak awal dalam program penghijauan dan proses perencanaan program penghijauan itu sendiri, sehingga rasa memiliki program terdapat di masyarakat tersebut. Potensi masyarakat diberdayakan, dan implementasinya dengan penanaman pohon jati super. Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat lokal sangat penting untuk mendasari keinginan masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan lingkungan melalui program hutan desa.

Kondisi dan lingkungan DAS Babon segmen tengah mempunyai berbagai permasalahan, sebagai berikut :

1. Permasalahan Ekologi

Kondisi segmen tengah DAS Babon sebagai wilayah pengembangan kota memberikan implikasi yang besar terhadap terjadinya perubahan tatanan sistem alamiahnya. Implikasi terbesar yang dirasakan adalah adanya peningkatan jumlah penduduk dan kawasan terbangun, yang memberikan konsekuensi terjadinya perubahan pemanfaatan tataguna lahan dan konversi lahan. Konversi lahan yang cukup signifikan telah mengakibatkan timbulnya permasalahan lingkungan, seperti misalnya sedimentasi, peningkatan debit puncak dan pencemaran air, erosi dan longsor lahan. Hal ini disebabkan semakin luasnya lahan yang tertutup oleh lapisan kedap air, sehingga kemampuan infiltrasi dan daya tampung volume air DAS Babon berkurang.

Hal ini menyebabkan hujan yang jatuh menjadi aliran permukaan tanah, yang selanjutnya memberikan dampak terjadinya pencapaian proses akumulasi aliran permukaan sehingga memberikan peluang terjadinya banjir. Meluasnya daerah rawan banjir di bagian hilir DAS sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi DAS Babon dan erat kaitannya dengan terjadinya erosi tanah di bagian hulu dan pengendapan. Banyaknya sedimen telah mengakibatkan pendangkalan sungai.

2. Permasalahan Sosial

Masyarakat DAS Babon merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang DAS Babon, meliputi daerah hulu, tengah dan hilir. Secara keseluruhan jumlah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah DAS Babon mencapai 406.486 jiwa, yang tersebar di 54 desa. Dari jumlah tersebut 32,53 % atau 132,236 jiwa bertempat di bagian hulu DAS Babon, sedangkan sisanya menempati bagian hilir. Tingginya tekanan penduduk di hulu DAS Babon memberikan petunjuk terjadinya perubahan jenis penggunaan lahan dari pertanian ke permukiman. Juga lembaga-lembaga masyarakat sebagai pengelola lingkungan hidup di wilayah tersebut masih lemah dengan masih banyaknya lahan kritis dan lahan terlantar.

3. Permasalahan Ekonomi

Tingkat pendapatan masyarakat yang relatif kecil dan adanya ketergantungan penduduk terhadap sumber daya alam, juga kondisi lahan yang kurang produktif di Sub DAS Babon mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu untuk peningkatan pendapatan masyarakat dibutuhkan program penanaman kembali lahan yang kurang produktif dengan jenis tanaman yang berfungsi sebagai reboisasi, sekaligus mempunyai nilai ekonomis tinggi.

Permasalahan tersebut di atas menyebabkan terpilihnya segmen tengah DAS Babon sebagai lokasi program pemulihan kualitas DAS melalui program hutan desa, dan mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut.

Program pemulihan kualitas DAS Babon dilaksanakan melalui penanaman bibit jati super oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kota Semarang.

Bertolak dari kondisi di atas maka perlu dikaji model partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan. Model pengelolaan lingkungan yang akan dikembangkan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara lingkungan Sungai Babon, akan tetapi juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan model pengelolaan lingkungan akan diterapkan pada masyarakat di segmen tengah DAS Babon.

1.2. Perumusan Masalah

Pengelolaan DAS Babon khususnya di segmen tengah, memerlukan unit pengelolaan, dan perlu adanya perbaikan dan pemulihan kualitas lingkungan guna mengembalikan keseimbangan tata air. Upaya pengelolaan lingkungan DAS Babon tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan tata air DAS dan menjaga agar fungsi sumber daya air dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan antar generasi, melalui penataan dan pembangunan hutan desa di kawasan DAS Babon Segmen Tengah. Pengelolaan DAS Babon terkait dengan lima aspek yaitu aspek manajemen dan organisasi, hukum dan peraturan, pembiayaan, teknis operasional serta partisipasi masyarakat. Aspek partisipasi masyarakat tidak terlepas dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan dan monitoring.

Pengelolaan DAS dengan penanaman pohon jati super merupakan upaya yang bisa ditempuh oleh masyarakat, untuk masyarakat dan hasilnya diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Terkait dengan tempat penelitian ini program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat terhadap kelestarian fungsi ekosistem, akan tetapi juga mempunyai fungsi ekonomis yang tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di samping merupakan usaha swasembada kayu.

Oleh karena itu perlu dilakukan kajian tentang tujuan-tujuan tersebut di atas dan bentuk partisipasi masyarakat dalam program tersebut, karena partisipasi sangat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi yang ada.

Untuk dapat seseorang berpartisipasi, perlu adanya kelembagaan yang baik di lingkungan mereka dengan dilakukan strategi yang tepat pula. Namun demikian keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, sedangkan perbedaan aktivitas masyarakat dipengaruhi oleh seberapa besar masyarakat tersebut tergantung pada kebutuhan sosial, ekonomi dan keadaan lingkungan alamnya. Dari uraian di muka, maka permasalahan penelitian ini adalah :

1. *Bagaimanakah pengelolaan lingkungan oleh Bapedalda Kota Semarang dalam program pembangunan hutan desa di segmen tengah DAS Babon ?*
2. *Bagaimanakah wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan desa di segmen tengah DAS Babon ?*
3. *Bagaimanakah kelembagaan masyarakat dalam pembangunan hutan desa di segmen tengah DAS Babon ?*
4. *Bagaimanakah strategi pengelolaan lingkungan hutan desa di segmen tengah DAS Babon sebaiknya dirancang ?*

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan DAS, maka diperlukan kajian mendalam sebagai tujuan dari penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengelolaan lingkungan oleh Bapedalda Kota Semarang dalam program pembangunan hutan desa di segmen tengah DAS Babon;
2. Untuk mengetahui wujud partisipasi masyarakat dalam program pembangunan hutan desa di segmen tengah DAS Babon ;
3. Untuk mengetahui kelembagaan masyarakat dalam program pembangunan hutan desa di segmen tengah DAS Babon
4. Untuk merumuskan rancangan strategi pengelolaan lingkungan hutan desa.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Masyarakat : sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat melalui proses pembelajaran dan pengembangan pola pikir untuk mewujudkan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Pemerintah : merupakan masukan bahan kebijakan, khususnya dalam pengelolaan lingkungan yang partisipatif, yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Pengembangan ilmu : mampu mengaplikasikan teori/konsep dalam pengelolaan lingkungan hidup yang partisipatif dalam upaya penguatan kelembagaan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Telaah Kepustakaan

2.1.1. Perencanaan Pengelolaan Lingkungan : Konsep dan Teori dalam Perspektif Partisipatif.

Menurut Friedman (1987) yang dikutip dari Hadi (2001:20) teori perencanaan didefinisikan sebagai cara-cara untuk menghubungkan antara dunia ilmiah dengan pengetahuan teknis untuk diimplementasikan dalam dunia publik (masyarakat). Tugas spesifik adalah membuat pengetahuan ilmiah dan teknis yang berguna bagi para pelaku di dunia publik.

Klasifikasi teori perencanaan sangat bervariasi, misalnya Friedman (1987) yang dikutip dari Hadi (2001:21) mengembangkan empat kategori yakni teori reformasi sosial, analisis kebijakan, pembelajaran sosial dan mobilisasi. Adapun Hudson (1979) yang dikutip dari Hadi (2001:22) membagi teori perencanaan kedalam lima kategori yang meliputi sinoptik, inkremental, transaktif, advokasi dan radikal. Dari teori-teori yang ada maka terdapat persamaan gagasan yaitu teori perencanaan transaktif dengan teori pembelajaran sosial. Sehingga menurut Hudson (1979) yang dikutip dari Hadi (2001:26), 'perencanaan bukan sesuatu yang terpisah dari bentuk-bentuk tindakan sosial (*social action*) tetapi merupakan proses yang terkait di dalam evolusi yang terus menerus dari gagasan melalui tindakan. Menurut Burchel (1988) yang dikutip dari Hadi (2001:27) pendekatan transaktif merupakan suatu media untuk mengeliminasi kontradiksi antara apa yang kita ketahui dengan bagaimana kita harus melakukan. Praktek dan teori selalu diperkaya di lapangan dengan adanya dialog untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat, nilai dan perilaku, kapasitas untuk tumbuh melalui kerjasama dan semangat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Menurut Friedman (1973) yang dikutip dari Hadi (2001:27) perencanaan *transaktif* /pembelajaran sosial dimaksudkan sebagai upaya untuk menjembatani *communication gap* antara pengetahuan teknik para perencana dengan pengetahuan keseharian masyarakat. Jarak antara perencana yang memiliki pengetahuan yang telah dimodifikasi (*processed knowledge*) dan masyarakat (*clients*) yang mendasarkan pada pengalaman keseharian semakin dekat.

Perencana dan masyarakat terlibat dalam proses dialog yang tidak formal dimana peran perencana lebih sebagai fasilitator, mediator maupun pendidik. Dari uraian di atas dapat disimpulkan karakteristik dari teori perencanaan *transaktif* / pembelajaran sosial yaitu :

a. Pembelajaran timbal balik

Perencanaan harus dilakukan melalui kontak langsung dengan masyarakat yang terpengaruh melalui dialog personal.

b. Tidak hirarkhis

Perencana dan masyarakat terlibat dalam proses dialog yang tidak formal dan peran perencana sebagai fasilitator.

c. Fleksibel.

Upaya untuk menjembatani *communication gap* antara pengetahuan para perencana dengan pengetahuan keseharian masyarakat.

d. Kontekstual

Perencanaan disesuaikan dengan pemahaman baru tentang kemungkinan adanya perubahan yang ditemukan melalui dialog, termasuk mengkaji konsekuensi dari adanya berbagai alternatif perencanaan;

e. Tujuan utama bersifat sosial

Memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan mendasarkan pada *interest* termasuk dari masyarakat.

Dari uraian tentang teori perencanaan, disimpulkan bahwa Teori Perencanaan yang ideal adalah yang tidak hanya mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat tetapi juga yang mampu memadukan berbagai kepentingan yang terlibat (Hadi,2001), terdapat 7 langkah dalam perencanaan (*The Seven Magic Steps of Planning*), yaitu :

a. Merumuskan masalah.

Merumuskan masalah melalui identifikasi tentang masalah lingkungan hidup sangat penting, karena berawal dari sinilah analisis perencanaan dimulai. Masalah lingkungan hidup adalah perbedaan (kesenjangan) kondisi lingkungan hidup saat ini (fakta) dengan kondisi lingkungan hidup yang diinginkan.

b. Menetapkan tujuan.

Menetapkan tujuan untuk mendokumentasikan masalah lingkungan hidup apa saja yang dirasakan oleh masyarakat saat ini, karena proses perencanaan akan berawal dari permasalahan yang timbul. Permasalahan ini akan diatasi secara sistematis sehingga kita dapat mencapai sasaran yang kita inginkan.

c. Mengkaji fakta.

Mengkaji masalah bermanfaat untuk memudahkan kita melihat prioritas masalah, melihat hubungan antara masalah yang saat ini dirasakan dengan masalah potensial dari adanya rencana kegiatan, melihat hubungan masalah dengan kegiatan atau melihat penyebaran masalah dalam konteks keuangan.

d. Mencari alternatif solusi.

Upaya mengembangkan alternatif solusi merupakan suatu teknik untuk meneliti berbagai pilihan strategi 'program' pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari hasil tahap analisis sebelumnya yaitu analisis tujuan.

e. Memilih alternatif terbaik.

Untuk menetapkan program yang strategis dengan menggunakan kriteria kemampuan dan kewenangan terlebih dahulu, sehingga kita mampu memilih program mana yang mempunyai *leverage* tinggi.

f. Mengkaji alternatif.

Di dalam analisis alternatif harus dibuat terukur. Tanpa keterukuran isi maka sasaran program akan menjadi sulit dikembangkan.

g. Mengimplementasikan

Pengesahan program dalam pengambilan keputusan dengan keluarnya rekomendasi pelaksanaan kegiatan.

Dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan DAS Babon, maka partisipasi masyarakat akan menentukan keberhasilan program dimaksud dan sekaligus sebagai upaya masyarakat untuk merubah kondisi mereka kearah keadaan yang lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan konsep pengembangan masyarakat atau *community development*, dan ditinjau dari sisi program merupakan suatu aksi atau kegiatan yang dapat membuka peluang lebar bagi partisipasi masyarakat (Taruna, 2002).

Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menegaskan pentingnya peningkatan kemandirian masyarakat, keberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Amanat dari Undang-undang tersebut di atas dapat diwujudkan manakala partisipasi masyarakat dapat ditumbuhkan melalui pengembangan masyarakat. Dalam teori perencanaan transaktif/ pembelajaran sosial yang mempunyai karakteristik yang sesuai dengan pengembangan masyarakat disebutkan bahwa peran perencana hanya sebagai fasilitator, mediator maupun pendidik bagi masyarakat.

2.1.2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat dinyatakan sebagai alat untuk memperbaiki dan meningkatkan partisipasi seseorang atau kelompok dalam rangka penyusunan program yang relevan, perencanaan yang realistis, pelaksanaan program yang memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan (Robert dalam Oetomo, 1997).

Partisipasi seseorang atau masyarakat diartikan sebagai bentuk penyerahan sebagian peran dalam kegiatan dan tanggungjawab tertentu dari suatu pihak ke pihak yang lain. Partisipasi tersebut memerlukan kesediaan kedua belah pihak dalam suatu hubungan yang saling menguntungkan (Oetomo, 1997).

Partisipasi juga dapat dilihat dalam kaitannya dengan keinginan untuk ikut mengambil inisiatif dan terlibat secara sukarela untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengkaji keadaan, permasalahan dan potensi sendiri guna menentukan hal-hal yang menyangkut perbaikan diri, kehidupan dan penghidupan masyarakat itu sendiri (Handoko, 1998).

2.1.3. Manajemen Partisipatif

Manajemen partisipatif merupakan pendekatan penting dalam reorientasi program, yakni melakukan pergeseran terhadap penekanan aktifitas menjadi penekanan hasil. Orientasi terhadap aktifitas akan membuat sistem yang dilakukan hanya bersifat semu, sedangkan orientasi terhadap hasil akan memberikan motivasi untuk beraktifitas mencapai solusi yang sistematis, sehingga akan tercapai kerjasama erat dengan masyarakat dan muncul partisipasi dalam penyelesaian masalah (Korten, 1983).

Penerapan manajemen partisipatif pada komunitas yang berpenghasilan rendah merupakan cara yang dinamis dan fleksibel untuk mengumpulkan informasi bagi keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pengembangan, dengan berbagai aktifitas didalamnya, yang menurut Davidson & Pelternburg (1993) dan Thompson (1999),

- a. Meningkatkan kesadaran dan pengertian tentang pelaku dan kelompok penting pada level lokal;
- b. Memperbaiki kualitas dan kuantitas informasi tentang kondisi lokal;
- c. Mengidentifikasi pilihan pembangunan lokal yang memungkinkan;
- d. Memobilisasi sumber daya dan potensi masyarakat guna memenuhi pilihan-pilihan pembangunan;
- e. Mendorong penduduk setempat guna mengidentifikasi hambatan-hambatan dengan menetapkan prioritas dan melakukan aksi;
- f. Mempererat kepercayaan diri dan kemampuan organisasi masyarakat;
- g. Mengembangkan dan mendukung mekanisme untuk mengatasi konflik lokal dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa manajemen partisipatif memberikan perhatian pada proses pengembangan pola pikir dan pola sikap, pengkayaan pengalaman dan pengetahuan serta proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperkuat asosiasi masyarakat dan memperkuat mekanisme baru. Dengan mekanisme yang baru ini lembaga pemerintah dapat bertanggung jawab terhadap program-programnya. Oleh karena itu manajemen partisipatif memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan (*Sharing ideas*), jalin kepentingan (*Knitting interest*) dan memadukan karya (*Synergy of action*) di antara stakeholders. Terutama memberikan kesempatan pada masyarakat lokal untuk terlibat dalam pelaksanaan program (Mitlin & Thomson, 1999).

Manajemen partisipatif dapat juga digunakan sebagai strategi untuk meminimalkan terjadinya kegagalan/ hambatan dalam pelaksanaan yang tidak fleksibel, lemahnya kapasitas kelembagaan, kurang tepatnya design implementasinya serta kurangnya partisipasi masyarakat (Oetomo, 1997).

Manajemen partisipatif mendorong munculnya partisipasi yang lebih besar dalam masyarakat, dimulai dari perencanaan sampai implementasi upaya pembangunan dalam level komunitas (Korten, 1983).

2.1.4. Kelembagaan Masyarakat.

Masyarakat setempat (*community*) merupakan anggota sesuatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga mereka merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tadi disebut masyarakat setempat (Soerjono, 1987). Adapun kelembagaan masyarakat menurut Charles H. Page; adalah “sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antara manusia yang berkelompok di dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan asosiasi”.

Menurut Sumner yang dikutip (Soejono, 1987) suatu kelembagaan masyarakat bertujuan memenuhi kebutuhan pokok manusia, dan pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi yaitu antara lain :

- a. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertindak laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah dalam masyarakat terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan;
- b. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan;
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian, yaitu artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

2.1.5. Penguatan Kelembagaan Masyarakat.

Perilaku kerja dan hubungan manusia merupakan dua konsep utama dalam membahas nilai dan perilaku hubungan masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat setempat akan mengubah pola-pola hubungan kerja secara keseluruhan. Perubahan ini bersifat mendasar yang berhubungan dengan landasan filsafat dan pandangan hidup masyarakat secara kolektif (Salim, 2002), sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Hubungan perubahan dalam sosial, ekonomi masyarakat akan mengubah pola perilaku manusia dalam hubungan kerja yang dibentuknya;
2. Hubungan manusia akan mengalami perubahan sesuai dengan pergeseran penghargaan manusia terhadap konsep waktu, nilai kerja, masa depan keluarga, dan lain-lain.

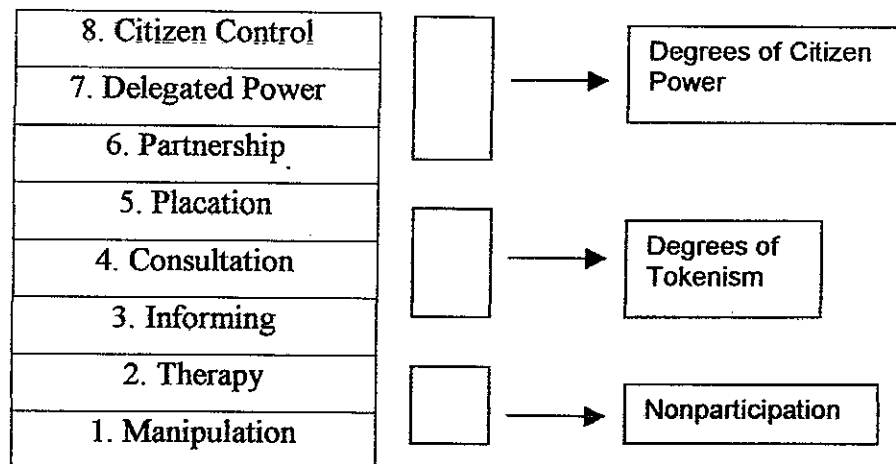
Di tengah masyarakat telah sejak lama dikenal berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan kata lain, di samping memberikan ketrampilan kepada masing-masing warga desa tersebut, juga diajarkan kemampuan berorganisasi, dan mengelola kegiatan. Maksudnya adalah agar masyarakat setempat tidak pasif, melainkan dapat menjadi aktif dan dinamis kehidupannya. Hal ini disebut sebagai kegiatan pengembangan masyarakat atau *community development*. Berbagai kegiatan pengembangan masyarakat menggunakan berbagai teknik komunikasi yang juga termasuk komunikasi pembangunan.

Tujuan pembangunan kemampuan adalah pada tingkat lokal, yaitu untuk meningkatkan partisipasi kelompok pengguna dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek. Beberapa proyek mengandalkan partisipasi pengguna, tetapi terbatas dalam pelaksanaan keputusan yang telah diambil (Daninda, 1992). Kelompok terdiri dari orang-orang yang heterogen yang pada umumnya mampu mengaitkan persoalan dengan berbagai macam kerangka acuan (*frame of reference*) yang merupakan saluran bagi pengetahuan yang relevan (termasuk kontak dengan personalia sumber daya luar yang memberikan keahlian yang tidak dimiliki oleh organisasi) disertai dengan seorang pemimpin yang memudahkan proses kreatif.

Partisipasi masyarakat di dalam kelompok memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah. Hal ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan gagasannya baik langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat juga menjadi forum pendidikan publik, baik melalui proses pemahaman tentang kebijaksanaan maupun melalui bagaimana suatu keputusan diproses.

Menurut Sherry Arnstein dalam Hadi (1999), partisipasi masyarakat dapat dibagi ke dalam delapan tingkatan atau delapan tangga :

Bagan 1
Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation



Sumber : Arnstein, Sherry R (1969) dalam Hadi (1999)

Pada tingkat yang paling bawah *manipulation* dan *therapy* disimpulkan sebagai tingkat yang bukan peranserta atau “*non-participation*”. Tingkat *informing* dan *consultation* disebut sebagai tingkatan sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat untuk mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara. Bentuk peranserta *placation* dipandang sebagai bentuk yang lebih tinggi, dimana masyarakat memiliki hak untuk memberikan *advice* tetapi keputusan tetap di tangan pemrakarsa kegiatan. Pada tingkat *partnership*, masyarakat memiliki ruang untuk bernegosiasi dan terlibat dalam “*trade-off*” dengan para pemegang kekuasaan. Pada tingkat *delegated power* dan *citizen control* masyarakat memiliki kekuatan mayoritas untuk mengambil keputusan.

Pemerintah harus menciptakan dan memperkuat kemitraan yang efektif dengan PKK (wanita), pemuda, kelompok masyarakat, sektor swasta, pemerintah lokal, kelompok pengajian dan LSM (Warah, 1997).

Kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah tersebut merupakan bagian dari proses yang ada dan memiliki peran penting dalam pengembangan kemandirian komunitas dan mampu menghasilkan perubahan dalam masyarakat (Wiliam, 1997, Gilbert & Ward, 1984). Kemitraan dapat dinyatakan sebagai mekanisme untuk memastikan agar kelebihan komparatif berbagai pelaku yang berbeda dalam proses pengembangan, di eksploitasi secara *mutual-support*, yaitu bahwa kelebihan dan kekurangan sektor publik, swasta,

pemerintah, non-pemerintah dan masyarakat diselaraskan. Dengan demikian tercapai kekuatan dan kemandirian di samping dapat meminimalkan kelemahan yang dimiliki masyarakat (Warah, 1997, Glaser & Denharelt, 1997).

Kemitraan dapat diartikan sebagai strategi kunci untuk implementasi manajemen partisipatif dan mempunyai berbagai kelebihan yaitu :

- a. Memberikan mekanisme *resolving* apabila ada kesenjangan antara kebutuhan/tuntutan dalam penetapan layanan dasar;
- b. Mendorong berbagai sektor yang berbeda untuk memperoleh keterampilan dan sumberdaya satu sama lain serta memberikan mekanisme efektif untuk meminimalkan resiko;
- c. Menciptakan satu kesatuan paham dalam pengembangan komunitas, sehingga dapat mengurangi kesenjangan implementasi yang terlalu banyak.

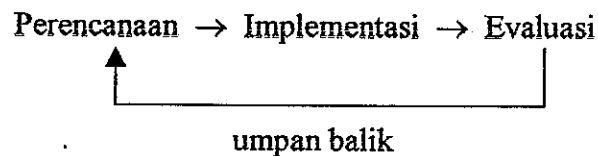
Berkaitan dengan pengembangan partisipasi masyarakat jika dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat, maka 8 (delapan) tangga ini dapat dipakai untuk melihat tingkat keberhasilan dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat di segmen tengah DAS Babon. Hal tersebut sejalan dengan konsep pengembangan masyarakat untuk merubah suatu keadaan menjadi lebih baik. Pengembangan masyarakat atau *community development*, jika ditinjau dari program merupakan suatu aksi atau kegiatan yang dapat membuka peluang lebar bagi partisipasi masyarakat (Taruna, 2002).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya pembangunan masyarakat dalam pembentukan kelompok masyarakat penanam pohon jati dalam upaya konservasi wilayah tengah DAS Babon, adalah suatu proses pembelajaran dimana masyarakat diharapkan bisa belajar membantu diri mereka sendiri, seperti amanat UU Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 Pasal 7 ayat (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Proses pembangunan masyarakat tersebut merupakan proses dalam menentukan tujuan mereka, mengumpulkan semua kondisi yang ada, membandingkan kondisi sekarang dengan apa yang ingin diraih. Untuk mengidentifikasi kebutuhan, mengembangkan rencana yang memungkinkan, mengevaluasi hasilnya dan menentukan arah tindakan untuk masa mendatang.

2.1.6. Evaluasi Program

Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada perencanaan saja, namun juga dalam melakukan evaluasi kegiatan. Perencanaan dan evaluasi merupakan suatu proses yang terus menerus, berawal dari perencanaan, implementasi (*action*), evaluasi dan perencanaan kembali.

Menurut Boothroyd (1986), dikutip Hadi (2001), evaluasi diperlukan untuk memperbaiki perencanaan seperti dalam “loop” berikut :



Menurut Boothroyd (1986) ada 3 (tiga) alasan evaluasi itu dilaksanakan :

1. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah program (sumber-sumber aktivitas dan strategi) mampu memecahkan masalah yang dirumuskan pada tahap awal perencanaan;
2. Evaluasi diperlukan untuk menyajikan informasi yang dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan dalam melakukan perbaikan dan “*adjustment*” sebagaimana yang diuraikan dalam alasan pertama;
3. Evaluasi memberi masukan informasi tentang bagaimana proyek berlangsung, sebagai motivasi dan kepuasan pihak-pihak yang terlibat.

2.2. Kerangka Pemikiran.

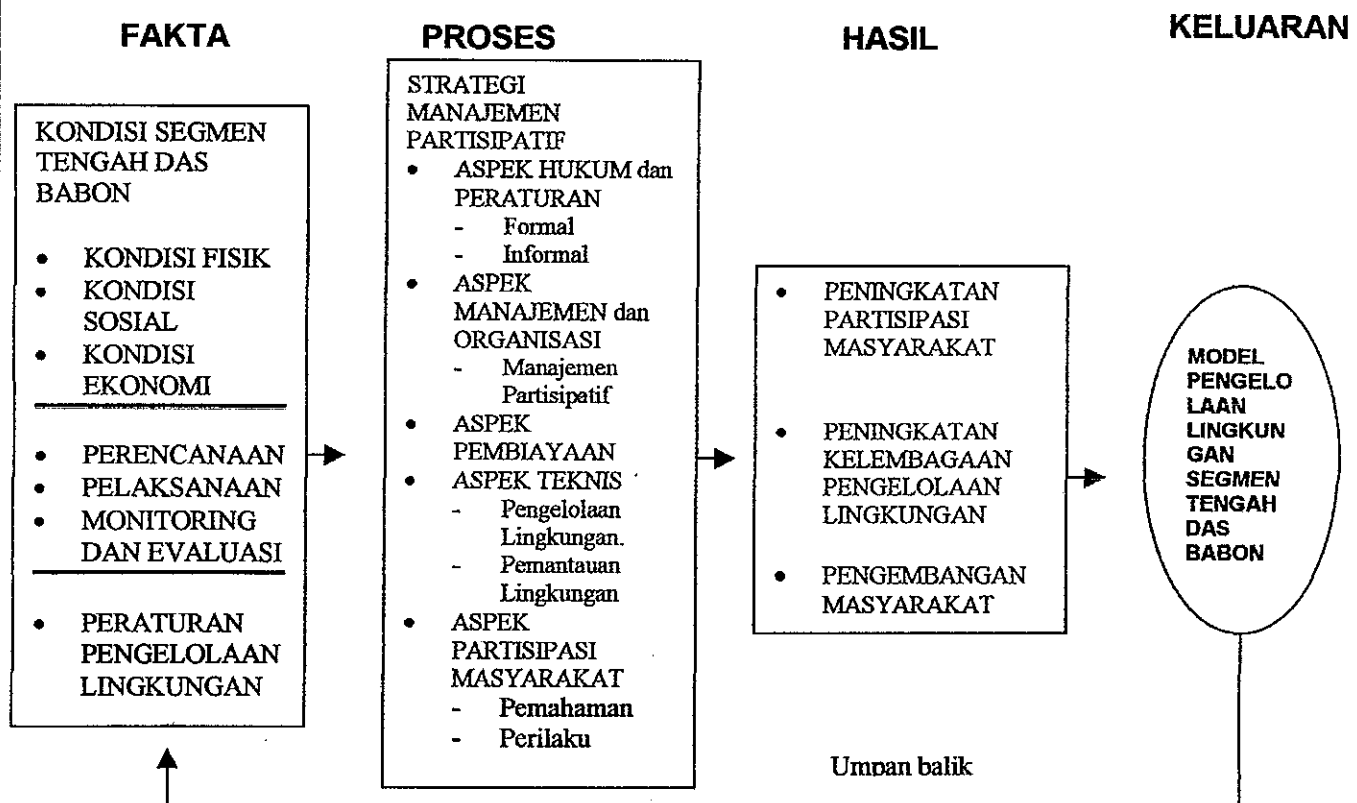
Perubahan paradigma pembangunan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) memunculkan berbagai strategi pembangunan. Manajemen partisipatif adalah salah satu strategi yang dianggap efektif dalam menggerakkan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya rasa saling bertanggungjawab yang tinggi antara pihak-pihak terkait (*stakeholders*) (Setiawan, 1998; Shirley, 1969).

Tolok ukur berjalannya manajemen partisipatif dapat diukur melalui derajat tingkat partisipasi *stakeholders*. Dalam penelitian dititik beratkan pada partisipasi dalam pemulihan lahan kritis di segmen tengah DAS Babon dengan penanaman jati super.

Berperannya lingkungan sebagai basis ekonomi masyarakat mendorong masyarakat untuk mempertahankan eksistensi lingkungannya dan merespon berbagai kerusakan lingkungan, sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat, dan dapat diketahui kebenaran, apakah tingkat partisipasi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang melekat pada sumberdaya yang dikelola. Adapun dari pernyataan tersebut maka alur kerangka pikirnya adalah sebagai berikut :

Diagram 1

ALUR PIKIR
Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Partisipatif
Program Pembangunan Hutan Desa



2.3. Definisi Konseptual.

- **Evaluasi** : merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan suatu tugas dan fungsi yang dibebankan. Juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktifitas di masa mendatang, sebagai suatu proses yang berkelanjutan.

- **Pengelolaan Lingkungan .**

Lingkungan hidup menurut UU No. 23 Th. 1997 sebagai suatu ekosistem yang terdiri atas berbagai sub sistem yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Adapun pengelolaan Lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi konservasi, yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;

- **Hutan Desa**, adalah hutan yang ditanam atau tumbuh baik di Kota atau di tanah desa (bukan tanah milik rakyat serta bukan tanah hutan negara), seperti turus jalan, sepadan sungai, pelindung sumber mata air, seputar kuburan, seputar lapangan, halaman dan kebun kantor/sekolah, bondo deso, dimana pengelolaan hutan ini dilakukan oleh desa beserta warganya dengan prinsip keterbukaan dan kebersamaan.
- **Pembangunan Hutan Desa**, adalah kegiatan penanaman tanaman kayu-kayuan dengan bibit unggul pada lahan milik desa/kota untuk meningkatkan fungsi ekologis, sosial dan ekonomis serta kesejahteraan masyarakat.
- **Segmen Tengah.**, adalah salah satu bagian (dalam hal ini bagian tengah) dari pengelompokan wilayah yang didasarkan pada kesamaan karakteristik. Dalam penelitian ini Sungai Babon dibedakan dalam tiga segmen wilayah yaitu wilayah hulu, tengah dan hilir. Segmen tengah merupakan daerah aliran sungai yang secara hidrologis terletak di tengah. Kawasan tengah dan hulu perlu mendapatkan prioritas penanganan dari berbagai aspek lingkungan, karena secara geomorfologis termasuk ke dalam wilayah yang tingkat bahaya erosinya berat hingga sangat berat.
- **Kelembagaan Masyarakat**, suatu jaringan dari proses-proses hubungan antara manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya. (Leopold von Wiese dan Howard Becker dikutip Soejono, 1987).
- **Partisipasi** merupakan suatu bentuk penyerahan sebagian peran dalam kegiatan dan tanggung jawab tertentu dari suatu pihak ke pihak lain dan memerlukan kesediaan kedua belah pihak dalam hubungan yang saling menguntungkan. (Oetomo, 1997).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pembangunan hutan desa di DAS Babon, Kecamatan Tembalang. Oleh karena itu konsep-konsep yang berkaitan dengan program pengelolaan lingkungan di DAS Babon melalui partisipasi masyarakat perlu dioperasionalkan. Secara bertahap dalam bab ini diuraikan ruang lingkup, metode pengumpulan data, sumber data, metode sampling dan rancangan analisis data.

3.2. Ruang Lingkup

Program pengelolaan lingkungan pembangunan hutan desa yang diteliti meliputi :

- Konservasi lahan : Program pembangunan hutan desa oleh masyarakat sebagai upaya merehabilitasi lahan-lahan kritis, merupakan lahan yang harus dikonservasi akibat tingginya tingkat sedimentasi sebagai akibat dari perubahan fungsi lahan.
- Keberlanjutan ekonomi ditekankan pada peningkatan pendapatan masyarakat dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam.
- Keberlanjutan sosial masyarakat, yang tercermin dalam kelembagaan pengelola lingkungan hidup masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan desa, tingkat hubungan masyarakat serta kepedulian masyarakat yang terlihat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dalam pengelolaan lingkungannya.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Segmen Tengah DAS Babon, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif (*purposive sampling*), yaitu Kelurahan Rowosari, Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Bulusan di segmen tengah DAS Babon dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan lokasi program hutan desa dengan penanaman pohon jati super.

3.4. Variabel-variabel yang diamati.

Untuk mengetahui prospek manajemen partisipatif dalam pengelolaan lingkungan di segmen tengah DAS Babon, maka variabel yang diamati adalah partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat sebagai bentuk pemanfaatan potensi lingkungan sebagai daerah konservasi wilayah atas Kota Semarang.

3.5. Sumber Data

Data bersumber dari data sekunder maupun data primer. Data sekunder merupakan data yang sumbernya diperoleh secara tidak langsung misalnya : dari hasil laporan-laporan instansi terkait maupun hasil penelitian, sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi di lapangan, FGD (*Focus Group Discussion*), kuesioner (angket), wawancara mendalam (*indepth-interview*) terhadap tokoh-tokoh kunci (*key-informan*), dan dokumentasi.

3.6. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Pengamatan lapangan dilakukan pada obyek penanaman jati super dari tahap perencanaan, pelaksanaan penanaman bibit jati super sampai dengan pemeliharaan tanaman dengan penyiraman, pembersihan lahan maupun pertemuan kelompok tani.

2. *Focus Group Discussion* (FGD).

FGD dilakukan untuk mengetahui tingkat keterlibatan masyarakat dalam program. Hasil diskusi yang berkembang dalam kelompok-kelompok tani penanam jati super pada saat sosialisasi program pembangunan hutan desa di segmen tengah DAS Babon, kemudian dianalisa guna menetapkan peran antara masyarakat sebagai pelaksana dan pemerintah sebagai fasilitator.

3. Kuesioner

Populasi dalam penelitian ini adalah *stakeholders* yang terkait dengan pengelolaan hutan desa di wilayah pembangunan hutan desa. Pengumpulan data dengan kuesioner diperoleh dari responden yang terpilih dan dipilih secara acak pada anggota kelompok tani penanam jati super di masing-masing kelurahan. Jumlah kuesioner pada tingkat kelurahan berjumlah 30 (tiga puluh), dan dari masing-masing kelurahan dipilih sebanyak 10 responden. Responden cukup

mewakili anggota kelompok tani yang pada masing-masing kelompok tani berjumlah ± 30 orang anggota kelompok tani.

3. Wawancara mendalam (*indepth-interview*)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi antara pewawancara dengan responden. Wawancara dilakukan berpedoman pada serangkaian pertanyaan baku yang merupakan pertanyaan inti, agar dapat terarah pada titik perhatian penelitian dan dikembangkan secara mendalam selama berlangsungnya wawancara. Pemilihan nara sumber terhadap tokoh kunci (*key informan*) diambil dari LKMD, pemuka masyarakat di tiga kelurahan dan dari kelompok-kelompok tani. Adapun nara sumber dari Pemerintah Kota Semarang meliputi : pegawai/ pejabat Kelurahan, Kecamatan, Bapedalda, dan Dinas Pertanian dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Lokal dan Tokoh Masyarakat : adalah institusi formal maupun non formal yang tumbuh dan berkembang di sekitar masyarakat yang dipandang memahami permasalahan pengelolaan DAS Babon melalui upaya konservasi dengan penanaman pohon jati super melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Institusi ini meliputi kelurahan dan LKMD serta tokoh masyarakat yang selanjutnya disebut *key persons*. Penentuan *key persons* diambil secara *purposive sampling* yang jumlahnya disesuaikan dengan target pencapaian informasi.
- b. Pemerintah Daerah : adalah institusi formal yang erat kaitannya dengan penanggungjawab program pengelolaan hutan desa di DAS Babon. Pengambilan sampling pada sektor ini menggunakan *purposive sampling*.
- c. Dokumentasi

Dokumentasi berupa catatan hasil wawancara maupun berupa foto kegiatan yang dilaksanakan dari tahap sosialisasi sampai dengan tahap monitoring dan evaluasi program pembangunan di segmen tengah DAS Babon.

3.7. Teknik Analisis.

Analisis Pemetaan Tingkat Partisipasi.

Analisa ini digunakan untuk mengidentifikasi peran, fungsi dan tingkat komitmen dari pelaksana pembangunan maupun tahapan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi program kegiatan pembangunan hutan desa oleh kelompok tani. Subyek yang dimaksud bisa berupa institusi formal maupun non formal. Peran dan

fungsi dari subyek harus dideskripsikan berdasarkan hasil observasi di lapangan maupun wawancara dengan subyek yang bersangkutan. Untuk mendukung analisis ini digunakan metode pembobotan dengan skala Likert, yaitu 1. Rendah; 2. Sedang; 3. Tinggi, sebagai berikut :

I. Tahap Perencanaan :

- 1.1. Frekuensi kehadiran kelompok tani dalam setiap pertemuan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan yang dilakukan oleh anggota kelompok bersama dengan fasilitator melalui kesepakatan bersama;
- 1.2. Mengajukan usul pada setiap pertemuan anggota kelompok tani terkesan terjadinya diskusi pada setiap pertemuan;
- 1.3. Usul yang dilakukan anggota kelompok merupakan usulan yang dapat diaplikasikan di dalam pelaksanaan program;
- 1.4. Penerimaan usul yang disepakati oleh anggota kelompok tani sebagai kesepakatan bersama.

II. Tahap Pelaksanaan;

- a. Pelaksanaan penanaman dilakukan atas inisiatif dari masyarakat ini merupakan suatu keinginan yang muncul dari masyarakat itu sendiri;
- b. Masyarakat perlu adanya dorongan dari pemerintah untuk melakukan kegiatan;
- c. Pemerintah melakukan kegiatan penanaman sendiri, masyarakat hanya sebagai pelaksana saja.

III. Tahap Evaluasi dan Monitoring

- a. Kelembagaan yang terbentuk melalui kelompok tani ditentukan oleh seberapa sering pertemuan rutin yang dilakukan oleh anggotanya;
- b. Kelompok masyarakat hanya melakukan pertemuan pada saat ada permasalahan di lapangan;
- c. Kelompok masyarakat hanya melakukan kegiatan secara individu dengan melakukan perawatan terhadap tanamannya sendiri. Dari uraian tersebut diatas dapat dilihat dalam tabel 1 :

TABEL 1
PEMBOBOTAN MELALUI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

No	PEMBOBOTAN	BOBOT
I.	TAHAP PERENCANAAN	
	1. Kehadiran di dalam rapat-rapat	
	1.1. Frekuensi kehadiran	3
	a. Selalu hadir	2
	b. Pernah tidak hadir	1
	c. Tidak hadir	
	2. Mengajukan saran/usul	
	2.1. Frekuensi pengajuan usul	3
	a. Selalu mengajukan usul;	2
	b. Kadang mengajukan usul;	1
	c. Tidak pernah mengajukan usul	
	3. Diterima tidaknya usul	
	3.1. Selalu diterima	3
	3.2. Kadang-kadang diterima	2
	3.3. Tidak pernah diterima	1
	4. Tingkat kesepakatan anggota kelompok tani	
	4.1. Disepakati semua anggota	
	4.2. Disepakati sebagian anggota	3
	4.3. Tidak disepakati anggota	2
		1
II.	TAHAP PELAKSANAAN	
	1. Dilakukan oleh masyarakat	3
	2. Dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat	2
	3. Dilakukan oleh pemerintah	1
III.	EVALUASI DAN MONITORING	
	1. Apabila kelompok masyarakat secara rutin melakukan pertemuan;	3
	2. Apabila kelompok masyarakat tidak secara rutin melakukan pertemuan;	2
	3. Apabila kelompok masyarakat tidak pernah melakukan pertemuan.	1

3.8. Waktu Penelitian

No	Pelaksanaan	Waktu	Keterangan
1.	Penelitian Pendahuluan	14 Oktober – 24 Desember 2002	Proposal Penelitian
2.	Pengumpulan Data	1 Januari – 10 Juni 2003	Penelitian
3.	Pengolahan Data	10 Juni - 10 Juli 2003	Hasil Penelitian
4.	Penyusunan Tesis	10 Juli 2003 – 2 September 2003	Revisi Akhir.

OPT-PUSTAK-UNDIP

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kondisi Fisik Segmen Tengah DAS Babon.

Kota Semarang dilihat dari topografi merupakan perpaduan antara dataran rendah di tepi pantai dengan tingkat kemiringan 2-5 % serta wilayah perbukitan dengan kemiringan 15-40 %. Dataran rendah di sebelah Utara mempunyai ketinggian 0,75 – 25 m, sedangkan daerah dataran tinggi yang terletak di sebelah Selatan mempunyai ketinggian antara 25 – 348 m di atas permukaan laut (DPL). Dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 3 m DPL, meliputi Kecamatan Semarang Utara, Semarang Tengah, sebagian Semarang Barat, sebagian Semarang Timur dan sebagian Tugu. Dataran tinggi dengan ketinggian antara ± 25 m s/d ± 348 m DPL meliputi Kecamatan Semarang Selatan, Tembalang, Mijen, Gunung Pati, sebagian Semarang Timur, sebagian Semarang Barat dan sebagian Tugu.

Kota Semarang memiliki 9 (sembilan) buah sungai besar dan 10 (sepuluh) sungai kecil dalam satuan Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan potensi suplai air bersih, perikanan serta ekosistem pesisir dan perairan. Salah satu sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Semarang yaitu DAS Babon yang merupakan salah satu DAS yang sangat penting bagi kelangsungan ekosistem Semarang dan sekitarnya. DAS Babon dengan luas areal sekitar 14.357 hektar, cenderung dapat dikategorikan DAS yang telah menunjukkan gejala degradasi lingkungan. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya banjir yang melanda kawasan hilir DAS Babon (Genuk dan Sayung) pada tahun 2001, sebagai akibat meluapnya sungai Babon; tingginya tingkat sedimentasi dan tingkat bahaya erosi serta fluktuasi debit air yang cukup tinggi. Gejala ini mengidentifikasikan telah terjadi gangguan terhadap fungsi DAS Babon. Gangguan terhadap DAS Babon umumnya diakibatkan dari tingginya tekanan penduduk terhadap lahan pertanian maupun aktifitas manusia, seperti : terjadinya alih fungsi lahan dan tegalan menjadi lahan terbangun untuk kawasan pemukiman/ pekarangan. Penelitian oleh Bappedal Propinsi Jawa Tengah dan Fakultas Geografi UGM tahun 2002 menggambarkan bahwa proporsi lahan terbangun di wilayah DAS Babon telah mencapai 44,79 % atau sekitar 7.3212, 2 Ha. Cakupan wilayah alirannya cukup luas, dengan panjang $\pm 17,5$ Km,

meliputi 6 (enam) Kecamatan, yaitu : Kecamatan Ungaran, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Genuk dan Kecamatan Sayung yang terdiri dari 30 Kelurahan/ Desa, sebagaimana ditabulasikan dalam tabel berikut ini :

TABEL 2
WILAYAH KELURAHAN DI DAS BABON.

KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN
<i>DAS Hulu</i>		
Kabupaten Semarang	Ungaran	Mluwih, Kalongan, Kawengan, Kalikayan.
Kota Semarang	Banyumanik	Pudakpayung, Gedawang, Banyumanik, Padangsari, Padalangan, Sumurboto, Jabungan, Ngesrep, Srandol Wetan.
<i>DAS Tengah</i>		
Kota Semarang	Tembalang	Rowosari, Meteseh, Bulusan, Kramas, Tembalang, Sambiroto, Sendangmulyo, Mangunharjo.
	Pedurungan	Penggaron Kidul, Plamongan Sari
Kabupaten Demak	Mranggen	Kebon Batur, Batusari, Jamus
<i>DAS Hilir</i>		
Kabupaten Demak	Sayung	Sayung
Kota Semarang	Genuk	Penggaron Lor, Sambungharjo, Bangetayu Wetan, Kudu, Banjardowo, Karangroto, Trimulyo.

Sumber : Bapedal Propinsi Jawa Tengah, 2002

4.1.1. Pemanfaatan Sungai.

Masyarakat di segmen tengah DAS Babon yang aktif memanfaatkan sumber air dari Sungai Babon bisa dikatakan relatif besar karena 64,9 % responden menyatakan masih menggunakan air sungai Babon untuk keperluan sehari-hari. Hal ini bisa disadari karena kualitas air sungai di daerah tersebut relatif masih baik.

Responden di Kelurahan Bulusan dan Meteseh hanya memanfaatkan secara umum kegunaan dan fungsi sungai. Adapun tingkat pemanfaatan Sungai Babon oleh masyarakat di segmen tengah DAS Babon dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3
MANFAAT SUNGAI BABON TERHADAP PENDUDUK
DI SEGMENT TENGAH

No.	PEMANFAATAN	N (orang)	%
1.	BERMANFAAT	20	64,9
2.	KURANG BERMANFAAT	10	35,1
2.	TIDAK BERMANFAAT	-	-
	TOTAL	30	100

Data Primer Telah Terolah, 2002

Sebesar 64,9 % responden menganggap Sungai Babon bermanfaat, sedangkan 35,1 % beranggapan kurang bermanfaat. Responden yang menyatakan bermanfaat hampir seluruhnya tinggal dekat dengan Sungai Babon dengan jarak antara 10-500 m. Mereka memanfaatkan untuk keperluan pertanian, peternakan maupun penambangan galian C yang diambil secara manual dari dasar sungai. Alasan responden yang menyatakan kurang bermanfaat ialah karena jarak lokasi tempat tinggal relatif sangat jauh dari sungai. Kualitas air sungai Babon relatif masih baik dari pada di kawasan hulu, namun kerusakan akibat penambangan galian C cukup parah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Soroso (Ketua LKMD Kelurahan Rowosari) melalui wawancara tanggal 29 Juni 2003.

“air sungai masih jernih, tidak berbau, namun demikian dengan adanya penambangan batu pasir kadangkala keruh, kemungkinan akibat terkikisnya tebing sungai”.

4.2. Kondisi Sosial Masyarakat Segmen Tengah DAS Babon

Masyarakat DAS Babon merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang DAS Babon, meliputi daerah hulu, tengah dan hilir. Secara keseluruhan jumlah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah DAS Babon mencapai 406.486 jiwa, yang tersebar di 54 desa. Dari jumlah tersebut 32,53 % atau 132,236 jiwa bertempat di bagian hulu DAS Babon, sedangkan sisanya

menempati bagian tengah dan hilir. Jumlah penduduk pada daerah hulu berpotensi menyebabkan tingginya tekanan penduduk terhadap lahan, sehingga akan menyebabkan terjadinya dampak kerusakan lingkungan dan dirasakan oleh penduduk yang tinggal di wilayah hilir.

Masyarakat pada wilayah penelitian dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu masyarakat asli dan masyarakat pendatang. Data penelitian menunjukkan bahwa masyarakat asli jauh lebih besar dari pada masyarakat pendatang. Masyarakat pendatang hanya sekitar 15 % dari masyarakat asli. Masyarakat asli rata-rata telah mendiami wilayah tersebut selama 20 tahun.

Mata pencaharian penduduk di segmen tengah DAS Babon meliputi : petani, jasa, buruh bangunan, buruh industri,, pegawai, pedagang serta pengangkutan/ transportasi. Rincian pekerjaan penduduk dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

TABEL 4
DISTRIBUSI PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN

No.	JENIS PEKERJAAN	KELURAHAN						JUMLAH TOTAL
		BULUSAN		METESEH		ROWOSARI		
1.	Petani Sendiri	191	10,68	1.655	27,28	489	12,20	50,16 %
2.	Buruh Tani	288	16,11	785	12,94	724	18,06	47,11 %
3.	Nelayan	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pengusaha	73	4,08	85	1,40	16	0,40	6,68 %
5.	Buruh Industri	111	6,21	72	1,19	1045	26,07	33,47 %
6.	Buruh Bangunan	238	13,30	1.035	17,06	1569	39,14	59,50 %
7.	Pedagang	175	9,79	63	1,04	32	0,80	11,63 %
8.	Pengangkutan	89	4,98	29	0,48	11	0,26	5,72 %
9.	PNS + ABRI	119	6,66	418	6,89	30	0,75	14,30 %
10.	Pensiunan	15	0,84	32	0,53	12	0,30	1,67 %
10.	Lain-lain/ Jasa	489	27,35	1.892	31,19	81	2,02	60,56 %
11.	Jumlah	1.788	100,00	6.066	100,00	4.009	100,00	

Data Sekunder Monografi Kelurahan, 200

4.3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Segmen Tengah DAS Babon.

Penghasilan terendah sebesar 200 ribu Rupiah/ per bulan dan tertinggi 1,5 juta Rupiah. Secara rinci komposisi penghasilan responden di wilayah studi dapat dilihat melalui Tabel 5 berikut ini :

TABEL 5
KOMPOSISI PENGHASILAN RESPONDEN

No	TINGKAT PENGHASILAN	KELURAHAN		
		ROWOSARI (%) N= 10 org.	METESEH (%) N = 10 org.	BULUSAN (%) N = 10 org.
1.	≤ 250 ribu	30.0	20.0	10.0
2.	250 ribu – 500 ribu	10.0	20.0	20.0
3.	500 ribu – 750 ribu	20.0	10.0	30.0
4.	750 ribu – 1 juta	10.0	30.0	20.0
5.	≥ 1 juta	30.0	20.0	20.0
	JUMLAH	100.0	100.0	100.0

Sumber : Data primer yang terolah 2003

Sebaran kemampuan ekonomi masyarakat sebanyak 65 % responden menyatakan tidak puas terhadap besarnya penghasilan mereka. Penghasilan yang mereka dapatkan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan biaya pendidikan anak.

4.4. Pembangunan Hutan Desa di Segmen Tengah DAS Babon.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Desa Propinsi Jawa Tengah, ditindak lanjuti Keputusan Kepala Bapedalda Kota Semarang No. 660.1/922 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Hutan Desa Kota Semarang tahun anggaran 2002, maka untuk DAS Babon ditetapkan tiga lokasi kelurahan dengan pertimbangan bahwa DAS Babon merupakan salah satu sungai di Kota Semarang yang mempunyai peran yang cukup strategis dalam menunjang pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Tiga kelurahan itu ialah :

a. Kelurahan Rowosari

Kelurahan Rowosari termasuk salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Tembalang yang mempunyai luas desa cukup besar, sekitar ± 870 Ha, yang terdiri dari sawah tadah hujan seluas 275,077 Ha, tanah/ lahan kering seluas 135,13 Ha, lahan perkarangan/bangunan seluas 300,50 Ha, lahan untuk lapangan olah raga seluas 1,80 Ha dan tanah makam/sungai seluas 7,05 Ha dengan panjang jalan yang mengelilingi sekitar 13 km. Ditinjau dari kondisi topografi,

Rowosari termasuk wilayah bergelombang dengan curah hujan cukup tinggi sekitar 2055 mm/tahun.

b. Kelurahan Meteseh

Topografi, Kelurahan Meteseh termasuk wilayah perbukitan dengan ketinggian sekitar 450 m di Atas Permukaan Laut (DPL). Curah hujan rata-rata pertahun sekitar 1800 mm/tahun. Luas desa \pm 499 Ha, dengan penggunaan lahan bervariasi, yaitu : sawah tadah hujan seluas 82 Ha, tanah kering seluas 55 Ha, lahan pekarangan/bangunan seluas 307 Ha, lapangan olah raga 1 Ha, taman rekreasi 0,5 Ha dan tanah makam/sungai seluas 1 Ha, fasilitas jalan 11 km.

c. Kelurahan Bulusan

Topografi, Kelurahan Bulusan termasuk dalam wilayah datar dengan ketinggian sekitar 25-27 m di Atas Permukaan Laut (DPL). Curah hujan rata-rata pertahun sekitar 2215 mm/tahun. Luas desa \pm 216 Ha, dengan penggunaan lahan bervariasi, yaitu : sawah tadah hujan seluas 43,242 Ha, tanah tegalan seluas 46,690 Ha, lahan pekarangan/bangunan seluas 120,40 tanah milik AD seluas 93,340 Ha dan tanah makam/sungai seluas 1 Ha, fasilitas jalan 10 km. Pembangunan hutan di segmen tengah DAS Babon melalui tahap-tahap sebagai berikut :

4.4.1. Tahap Perencanaan Program

Perencanaan program penanaman jati super di tiga kelurahan dilaksanakan oleh Tim Teknis Bapedalda Kota Semarang. Pembentukan Tim Teknis Pengelolaan Jati Super berdasarkan Keputusan Kepala Bapedalda Kota Semarang Nomor : 660.1/922 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Hutan Desa Kota Semarang Tahun Anggaran 2002. Tim teknis terdiri dari Bapedalda Kota Semarang, Dinas Pertanian Kota Semarang, Kecamatan Tembalang, Kelurahan Rowosari, Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Bulusan.

Adapun penyusunan rencana kegiatan pembangunan hutan desa ternyata telah dilakukan secara *bottom-up* dengan melibatkan peran serta masyarakat dan instansi-instansi terkait dalam suatu forum diskusi.

Tahap penyusunan rencana tersebut melalui tahapan-tahapan sosialisasi, penyusunan desain kegiatan sebagai berikut :

a. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan hutan desa. Sosialisasi ini juga dimaksudkan sebagai upaya pengenalan program sekaligus pembentukan dan pemilihan ketua kelompok untuk masing-masing kelompok tani. Sosialisasi dilaksanakan secara musyawarah melalui pendekatan partisipatif, sehingga dalam forum ini terjadi diskusi/ silang pendapat yang cukup menarik antara masyarakat sebagai pelaksana kegiatan maupun aparat pemerintah sebagai fasilitator. Forum ini sebagai forum curah pikir yang berlangsung di Kecamatan Tembalang, pada tanggal 10 September 2002 yang dihadiri oleh Bappedal Propinsi Jawa Tengah, ProLh-GTZ, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Semarang, Bapedalda Kota Semarang, Aparat Kecamatan Tembalang, Aparat Kelurahan Bulusan, Meteseh dan Rowosari, serta tokoh-tokoh masyarakat dan Karang Taruna dari 3 (tiga) Kelurahan tersebut. Pertemuan ini dimaksud sebagai langkah awal untuk menjaring gagasan/ ide masyarakat dalam rangka mewujudkan kegiatan pembangunan hutan desa yang berkelanjutan.

Gagasan/ ide yang dituangkan oleh masyarakat menjadi catatan penelitian. Peneliti berusaha menyimpulkan ide-ide yang berkembang di masyarakat dalam hal ini kelompok tani di 3 (tiga) kelurahan. Melalui gagasan/ide tersebut oleh peneliti dikembangkan menjadi tiga bagian yaitu tingkat keberhasilan yang akan dicapai, tingkat kegagalan maupun keterlibatan *stakeholders*. Hasil diskusi dapat terlihat bahwa masyarakat cukup kritis dalam menanggapi program yang akan mereka laksanakan. Masyarakat yang diwakili kelompok-kelompok tani telah mampu mengembangkan gagasan/ide menjadi bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan di lapangan. Hasil diskusi dapat dilihat dalam tabel 6 berikut ini :

TABEL 6
HASIL FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PETANI JATI SUPER
PADA TAHAP PERENCANAAN DI KECAMATAN TEMBALANG
(10 SEPTEMBER 2002)

No	Partisipan/Ide	Peluang Keberhasilan	Kegagalan	Keterlibatan					
				M	P	PT	LS	A	IN
1.	Bapak Suroso/ Penanaman pohon dan hasil diserahkan ke masyarakat	1. Partisipasi masyarakat; 2. Pemanfaatan tanah terlantar.	1. Adanya faktor alam/mati; 2. Adanya hama penyakit;	x	x	X	x	X	x
2.	Bapak Ir. Ali Ikhwan/ Keberlanjutan dan pemeliharaan	1. Bisa dipanen kayunya; 2. Lokasi aman; 3. Kebersamaan dalam pemeliharaan;	1. Lingkungan umum; 2. Tumbuhan sekali tebang; 3. Waktu tumbuh lama;	x	x	X	x	x	X
3.	Bapak Budi/ Pengawasan tanaman jati	1. Masyarakat harus bergilir dan punya kepedulian dalam mengawasi. 2. Alih profesi petani jadi buruh; 3. Pemanfaatan tanah kubur dan bengkok;	1. Erosi tinggi 2. Banyak pembangunan 3. Tempat tanam milik umum.	x	x	X	x	x	X
4.	Bapak Maryono/ Ahli waris	1. Bisa mewariskan kepada keluarga; 2. Perlu adanya kepastian hukum	1. Usia lanjut 2. Hak pewarisan	x	x				X
5.	Bapak Karjono/ Aturan yang harus disepakati.	1. Pembuatan aturan anggota kelompok yang disepakati kelompok; 2. Aturan pembagian hasil; 3. Keberlanjutan program.	1. Tidak adanya motivator dalam kelompok; 2. Belum ada aturan yang disepakati bersama	x	X				
6.	Bapak Pratomo Hadi Masyarakat harus berperan aktif	1. Partisipasi masyarakat sebagai modal; 2. Peningkatan ekonomi masyarakat. 3. Perlu adanya pedampingan.	1. Masih rendahnya motivasi masyarakat; 2. Masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang program .	x	x	X	x	x	X

Keterangan :

M : Masyarakat
P : Pemerintah
PT : Perguruan Tinggi

A : Aparat
IN : Industri
LS : LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Berdasarkan pengamatan peneliti dalam perencanaan program hutan desa di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Rowosari, Bulusan, dan Meteseh mendapat respon cukup tinggi. Respon masyarakat dapat dilihat dengan banyaknya peserta yang hadir dan aktif dengan pertanyaan-pertanyaan menyangkut permasalahan yang ada di lapangan dan teknis pelaksanaan, didukung oleh pernyataan Ketua Tim Teknis penanaman Jati Super Nurweni, SH pada tanggal 7 Juli 2003:

"Masyarakat sangat antusias, karena mereka telah diajak bersama-sama secara musyawarah dalam menentukan perencanaan program". Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan ini sangat tinggi hal ini dapat dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam memenuhi undangan masing-masing kelurahan telah terwakili oleh kelembagaan yang ada di kelurahan tersebut seperti LKMD, PKK, Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat".

b. Penyusunan Desain Kegiatan

Penyusunan desain kegiatan dilakukan bersama masyarakat melalui diskusi. Respon masyarakat di tiga kelurahan sangat tinggi dapat dibuktikan dengan 100 % undangan yang diundang mengikuti jalannya diskusi sampai selesai. Penyusunan desain kegiatan memunculkan pembagian peran yang akan dilaksanakan di lapangan. Berdasarkan pengamatan peneliti hasil diskusi dua arah antara pemerintah dan masyarakat memunculkan beberapa kesepakatan. Kesepakatan ini penting dalam menumbuhkan komitmen ke dua belah pihak, sehingga masing-masing pihak berperan sesuai dengan kesepakatan yang telah terbangun. Peneliti membagi peran menjadi 3 (tiga) kategori yaitu apabila kesepakatan itu terbangun oleh masyarakat akan mempunyai nilai tinggi, jika dilakukan bersama pemerintah mendapat nilai sedang dan apabila dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai nilai rendah.

Hasil musyawarah antar anggota kelompok membuahkan konsekuensi peran yang akan dilaksanakan pada tahap pelaksanaan maupun tahap monitoring dan evaluasi program pembangunan hutan desa. Peran masyarakat tinggi dalam pembentukan struktur organisasi, pelaksanaan kegiatan, pemilihan nama kelompok, pengurus kelompok tani, dan kewajiban dan hak anggota. Kesepakatan yang terbangun sedang melalui peran pemerintah dan masyarakat terbagi dalam penentuan lokasi tanam, penentuan jenis tanaman, jadwal pelaksanaan, skala prioritas dan monitoring evaluasi. Proses pencapaian kesepakatan yang terbangun merupakan inisiatif yang datang dari masyarakat, pemerintah hanya sebagai fasilitator. Kesimpulan penelitian terhadap kelompok tani cukup tinggi, hal ini disebabkan peran masyarakat lebih besar dari peran pemerintah. Pembagian peran dalam tahap perencanaan program pembangunan hutan desa pada masing-masing kelompok tani dapat dilihat dalam tabel 7 berikut ini :

TABEL 7
HASIL KESEPAKATAN KELOMPOK PETANI
JATI SUPER TENTANG PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT TERHADAP PERENCANAAN
(di Kecamatan Tembalang, 10 September 2002)

No	ISU	PERAN		KETERANGAN
		Pemerintah	Masyarakat	
1.	Penentuan lokasi tanam	X	X	Ditentukan bersama
2.	Pembentukan struktur organisasi		X	Kelompok masyarakat
3.	Pelaksanaan kegiatan		X	Kelompok masyarakat
4.	Pemilihan nama kelompok		X	Kelompok masyarakat
5.	Pengurus kelompok tani		X	Kelompok masyarakat
6.	Penentuan jenis tanaman	X	X	Ditentukan bersama
7.	Jadwal pelaksanaan kegiatan	X	X	Ditentukan bersama
8.	Skala prioritas	X	X	Ditentukan bersama
9.	Kewajiban dan hak anggota		X	Kelompok masyarakat
10.	Monitoring dan evaluasi	X	X	Ditentukan bersama

Pembagian peran pemerintah dan masyarakat dalam tahap perencanaan program pembangunan hutan desa pada masing-masing kelompok tani dapat dilihat dalam tabel 8 berikut ini :

TABEL 8
PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN HUTAN DESA SEGMENT TENGAH DAS BABON

No	MATERI/ MUATAN SOSIALISASI	ROWOSARI		METESEH		BULUSAN		METODE/ PENDEKATAN	TUJUAN/ TARGET
		Pem.	Mas	Pem.	Mas.	Pem	Mas		
1.	Merumuskan masalah	x	x	X	x	x	X	Diskusi Kelompok/ FGD	1. Menyamak an persepsi; 2. Identifikasi masalah; 3. Memecahkan masalah 4. Skala prioritas
2.	Menetapkan tujuan	x	x	X	x	x	X		
3.	Mengkaji fakta	x	x	X	x	x	X		
4.	Mencari alternatif solusi	x	x	X	x	x	X		
5.	Memilih alternatif terbaik	x	x	X	x	x	X		
6.	Mengkaji alternatif	x	x	X	x	x	X		
7.	Mengimplementasikan	x	x	X	x	x	x		

Forum sosialisasi pembangunan hutan desa ini juga berusaha menampung aspirasi dan gagasan masyarakat terhadap upaya peningkatan pengelolaan lingkungan DAS Babon maupun usaha peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, seperti misalnya : “usulan tentang perlunya dikembangkan sistem tumpangsari tanaman musiman, rumput gajah, tanaman tegak (buah-buahan) maupun bantuan ternak, yang diharapkan mampu menopang kondisi ekonomi masyarakat setempat”. Kesiapan masyarakat lokal serta minat dan semangat yang cukup besar diharapkan dapat mendasari keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan hutan desa di Kota Semarang.

c. Pembentukan Kelompok Tani Pengelola

Pembentukan kelompok tani dilaksanakan secara musyawarah di antara anggota masyarakat. Dalam hal ini instansi pemerintah bertindak sebagai fasilitator. Masing-masing kelompok tani ini dipimpin oleh seorang ketua dengan anggota anggotanya antara lain berasal dari tokoh masyarakat, karang taruna, petani, PKK, Mitra Kerja dan instansi terkait. Masing-masing anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam struktur organisasi tersebut. Untuk 2002 ini berhasil dibentuk 9 kelompok tani, yang berdasarkan wilayahnya (data susunan anggota terlampir).

d. Penentuan Lokasi

Salah satu pertimbangan yang digunakan dalam penentuan lokasi kegiatan pembangunan hutan desa di Kota Semarang adalah didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Berdasarkan RDTRK ditetapkan sebagai daerah konservasi (cadangan air bawah tanah);
2. Daerah rawan bahaya erosi dan banjir;
3. Faktor-faktor hidrologi dan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Lokasi pembangunan hutan desa di Kota Semarang pada tahun 2002 ini diarahkan di wilayah DAS Babon bagian tengah, dengan lokasi areal penanaman diprioritaskan pada lahan-lahan di luar kawasan Hutan Negara yang kurang produktif, antara lain :

- a. Di turus jalan;
- b. Pada lahan Bondo Desa (Kas Bengkok);
- c. Di sekitar lapangan umum;
- d. Pada areal kuburan;
- e. Lahan di sekitar sekolah/ Kantor Pemerintah;
- f. Di sekitar sumber mata air (sendang).

TABEL 9
LOKASI dan LUAS AREAL HUTAN DESA KOTA SEMARANG (2002)

No	DAS	Kecamatan	Kelurahan	Luas Areal (Km)	Jenis Tanaman	Jumlah Bibit (batang)	Keberhasilan %
1	Babon	Tembalang	1. Rowosari	8,70	Jati Super	5.000	95
			2. Meteseh	7,00	Jati Super	3.000	85
			3. Bulusan	4,50	Jati Super	3.500	90
	Jumlah					11.500	

Sumber : Laporan Kegiatan Hutan Desa Bapedalda, 2002

Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa jumlah bibit yang diberikan berdasarkan kepada luas areal tanam yang dimiliki setiap kelurahan. Kelurahan Rowosari mendapatkan lebih banyak dari kelurahan lainnya. Berdasarkan penelitian maka tampak bahwa tanaman hidup pada masing-masing kelurahan yaitu Rowosari jumlah yang tertanam dan keberhasilan hidup sebesar 95 %, Kelurahan Bulusan keberhasilan hidup sebesar 90 % sedangkan Kelurahan Meteseh hanya 85 %. Berdasarkan hasil wawancara dengan kelompok tani bahwa keberhasilan hidup disebabkan beberapa masalah. Seperti Di Kelurahan Rowosari banyak daun tanaman jati yang termakan ulat, Kelurahan Bulusan banyak tanaman yang terbakar diduga disebabkan oleh perusakan manusia, sedangkan di Kelurahan Meteseh banyak tanaman mati dikarenakan tempat penanaman yang salah. Banyak tanaman jati ditanam pada kondisi tanah padas dan kurangnya pemupukan.

e. Penetapan Bagi Hasil

Penetapan bagi hasil antara pihak Pemerintah Propinsi, Kota/Kecamatan/Kelurahan dan Masyarakat dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat, dengan menampung aspirasi dari masyarakat. Penetapan bagi hasil untuk masing-masing kelurahan berbeda, tergantung kepada hasil kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat dapat dilihat dalam tabel 10 berikut ini :

TABEL 10
HASIL KESEPAKATAN DENGAN PEMBAGIAN HASIL

<div>Kelurahan</div> <div>Instansi</div>	Rowosari	Metesch	Bulusan
	%	%	%
Propinsi Jateng	10	10	10
Kota Semarang	10	10	10
Kecamatan	5	5	5
Kelurahan	5	5	5
Masyarakat	65	60	60
Sosial	5	10	10

Sumber : Laporan Kegiatan Hutan Desa Bapedalda, 2002

Dari tabel terlihat bahwa pembagian hasil setiap kelurahan yang diwakili kelompok tani bervariasi berdasarkan kesepakatan para anggota yang kemudian disampaikan kepada fasilitator. Kelompok tani telah mampu menentukan seberapa jauh hasil yang diharapkan dan akan dinikmati pada saat panen. Masa panen jati ± 15 tahun untuk hasil yang baik yang secara teknis pada umur tersebut pohon jati super sudah layak untuk dipanen. Secara teknis oleh Dinas Pertanian dapat diperiksa bahwa dalam jangka 15 (lima belas) tahun pohon jati super telah mempunyai diameter 40 cm dengan tinggi 30 – 45 m. Tentunya secara teknis tanaman jati super tersebut memang sudah dapat dipanen dalam jangka 7 (tujuh) tahun. Oleh karena itu perlu adanya kesepakatan pengelolaan hasil panen yang disepakati bersama. Berdasarkan pengamatan peneliti dari hasil kesepakatan terbangun dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah mampu memberikan keputusan berdasarkan musyawarah pada masing-masing kelompok tani di tiap kelurahan. Hasil dari tahap perencanaan dapat dilihat dari tabel 11 berikut ini :

TABEL 11
TAHAP I PERENCANAAN PROGRAM

No	TAHAP	KETERWAKILAN			KEHADIRAN			PENGAJUAN SARAN			PENERIMAAN USUL		
		R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B
1.	Sosialisasi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.	Penyusunan Desain Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.	Pembentukan Kelompok Tani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.	Penentuan Lokasi Tanam	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.	Penetapan Bagi Hasil	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Keterangan : R = Kel. Rowosari; M = Kel. Meteseh; B = Kel. Bulusan.

Dari tabel 11 dapat disimpulkan bahwa rata-rata partisipasi kelompok tani dalam tahap perencanaan cukup tinggi (skor = 3). Hal ini dapat dilihat dalam dari skor yang diperoleh.

4.4.1.1. Persepsi Masyarakat dalam Perencanaan Program.

Tingkat persepsi kelompok petani terhadap perencanaan program hutan desa dengan penanam Jati Super dalam pengelolaan DAS Babon segmen tengah cukup tinggi. Berdasarkan penelitian tercermin dari besarnya persentase (48,6 %) responden yang tidak tahu keadaan air dan kondisi DAS Babon di wilayah mereka. Sebagian kecil responden (10,8 %) menganggap keadaan air Sungai Babon sudah tidak baik. Sekitar 40,5 % responden masih berpendapat bahwa keadaan air Sungai Babon masih dianggap baik hingga sangat baik.

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa masyarakat sebenarnya tidak tau mengenai kondisi DAS Babon, namun demikian mereka merasa sangat perlu untuk menjaga kondisi DAS Babon. Masyarakat menganggap positif program pembangunan hutan desa sebagai upaya mengatasi kerusakan lingkungan DAS Babon. Masyarakat menganggap kondisi lingkungannya perlu dilestarikan melalui kegiatan penanaman pohon yang dapat juga bermanfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat setempat.

Malalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara rutin oleh anggota kelompok petani masyarakat mampu membangun persepsi positif. Masyarakat mampu diberdayakan dalam pengelolaan lingkungan jika dilakukan pendekatan dalam program-program nyata pada kelompok-kelompok kecil. Melalui forum-forum yang terbentuk oleh kelompok mampu menumbuhkan kemandirian dalam merencanakan kegiatan atau program. Ketiga kelompok yang terdapat di 3 (tiga) kelurahan mempunyai perbedaan dalam karakteristik keanggotaan kelompoknya.

Persepsi positif di masyarakat akan menjamin kesepakatan anggota kelompok dalam terlaksananya kegiatan selanjutnya. Masyarakat diajak melakukan sesuatu kegiatan bagi kepentingan masyarakat itu sendiri. Kemandirian masyarakat akan mampu meningkatkan partisipasi bagi kemajuan program pembanguna hutan desa tersebut.

4.4.1.2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Program.

Lingkup partisipasi masyarakat di segmen tengah DAS Babon ini harus dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan daerah sekitar aliran DAS Babon, dan partisipasi di luar DAS Babon.

Partisipasi masyarakat ini pada umumnya diwujudkan secara swadaya masyarakat melalui kegiatan gotong-royong. Intensitas kegiatan gotong royong dapat misalnya berupa kerja bakti lingkungan. Hampir semua responden menyatakan berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan walaupun dalam tingkat kadar partisipasi yang berbeda. Apabila dikaitkan dengan partisipasi pembangunan hutan desa di DAS Babon, maka partisipasi masyarakat masih rendah, jika dibandingkan dengan partisipasi kegiatan lingkungan tempat tinggal mereka. Berdasarkan penelitian ditemukan masih banyak responden belum berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan hutan desa. Masyarakat masih melihat manfaat gotong-royong di lingkungan tempat tinggal menghasilkan manfaat yang langsung bisa dirasakan, seperti kebersihan lingkungan, sedangkan manfaat gotong-royong di DAS tidak dapat dirasakan secara langsung. Pengelolaan lingkungan di DAS Babon tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar, karena hasilnya tidak bisa dirasakan pada saat itu juga.

Berdasarkan penelitian, kelompok tani di masing-masing kelurahan sangat mendukung pembangunan hutan desa. Kelompok tani telah ikut aktif berpartisipasi di dalam perencanaan program, melalui peran aktif dalam mengemukakan gagasan/ide. Tingkat kehadiran dalam tahap perencanaan di 3 (tiga) Pada dasarnya masyarakat juga sangat mendukung dikarenakan akan ada manfaat bagi masyarakat sekitar.

A. Keberhasilan Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif merupakan bentuk partisipasi nyata masyarakat dalam mendukung suatu perogram. Melalui perencanaan yang melibatkan masyarakat dengan mengakomodasi semua kepentingan. Maka pembentukan kelompok tani dengan terbentuknya kelembagaan pengelolaan lingkungan melalui kegiatan penanaman jati super mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan yang partisipatif memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk mengambil suatu keputusan yang disepakati bersama. Bentuk partisipatif dengan terbentuknya wadah kelembagaan yang terbangun dari masyarakat sendiri. Adanya kelompok yang terbentuk pada masing-masing kelurahan merupakan wujud partisipasi yang terorganisir dan mampu melaksanakan kegiatan yang datangnya dari masyarakat.

Peneliti melihat bahwa masyarakat telah mampu menggalang kebersamaan melalui keanggotaan petani jati super. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran dan keterwakilan pada masing-masing kelurahan sangat tinggi. Menurut pengamatan peneliti kehadiran tokoh-tokoh masyarakat dalam perencanaan sangat membantu keberhasilan suatu program. Komitmen terbentuk dalam diskusi kelompok pada masing-masing kelompok tani, sampai dengan pengambilan keputusan berupa pembentukan keanggotaan, penunjukan ketua kelompok, bentuk keanggotaan sampai dengan keputusan dalam pembagian hasil. Peneliti melihat terjadinya proses perencanaan partisipatif apabila peserta dirangsang untuk aktif dalam menyampaikan ide-ide permasalahan sederhana yang terjadi di lingkungannya.

B. Kendala Perencanaan Partisipatif

Kegiatan perencanaan pembangunan hutan desa di Kota Semarang tidak lepas pula menghadapi beberapa kendala yang diperkirakan dapat mempengaruhi keberhasilan dari program ini. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat dalam perencanaan program telah mampu membuat perencanaan yang baik. Pengamatan peneliti dari hasil diskusi kelompok terlihat bahwa kepemimpinan informal sangat dibutuhkan dalam perencanaan partisipatif. Pemimpin informal terbentuk pada saat pembentukan kelompok namun yang menjadi kendala justru ada pada saat pelaksanaan program. Hasil diskusi kelompok peneliti melihat kendala ini pada umumnya berkaitan dengan lemahnya kepemimpinan informal. Kelembagaan masyarakat masih bersifat formal, aspek sosial budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat kota atau lokal masih tampak dominasi peran pemimpin formal, dalam hal ini kepala kelurahan. Sejauh ini hasil pengamatan peneliti masih banyak keputusan diserahkan kepada kepala kelurahan sebagai lembaga formal.

4.4.2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan hutan desa Kota Semarang mencakup beberapa aktivitas, yaitu sebagai berikut :

- a). Penyiapan lahan tanam yang meliputi pembersihan lahan dan pembuatan lubang tanaman yang dilaksanakan di Kelurahan Rowosari, Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Bulusan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2002;
- b). Penyediaan bibit oleh Bapedalda Kota Semarang sebagai penanggung jawab program dengan ukuran bibit jati super 40 – 60 cm sebanyak 11.500 batang.
- c). Penanaman bibit dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait dan partisipasi masyarakat sekitar lokasi kegiatan dilaksanakan pada awal Januari 2003 pada saat musim penghujan;
- d). Pemeliharaan tanaman dilaksanakan oleh masyarakat setempat dengan pembersihan alang-alang seputar tanaman dan penyiraman pada saat kemarau. Pembinaan oleh instansi yang terkait di bawah koordinasi Bapedalda Kota Semarang;

Hasil pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dalam tabel 12 berikut ini :

TABEL 12
TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM

No	TAHAP	PRAKARSA			KETERLIBATAN		
		R	M	B	R	M	B
1.	Penyiapan Lahan	3	3	3	3	3	3
2.	Pembersihan Lahan	3	3	3	3	3	3
3.	Pembuatan Lubang	3	3	3	3	3	3
4.	Penyediaan Bibit	1	1	1	1	1	1
5.	Penanaman	3	3	3	3	3	3
6.	Pemeliharaan	3	3	3	2	2	3

Keterangan : R = Kel. Rowosari; M = Kel. Meteseh; B = Kel. Bulusan.

Tabel 12 menampilkan matrik tahap pelaksanaan berupa tahapan dalam pelaksanaan yang terukur berdasarkan prakarsa dan keterlibatan masyarakat, tinggi dengan skor 3 apabila dilakukan oleh masyarakat, skor 2 apabila dilakukan bersama antara pemerintah dan masyarakat, sedangkan 1 apabila dilakukan oleh pemerintah. Dalam penyediaan bibit prakarsa maupun keterlibatan datangnya dari pemerintah, sedangkan kegiatan lainnya datang dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam matrik dapat dilihat bahwa Kelurahan Rowosari dan Kelurahan Meteseh dalam pemeliharaan tanaman masih belum mampu melibatkan anggota kelompok. Pada masing-masing kelompok tani tampak bahwa Kelurahan Bulusan mendapat nilai tertinggi kemudian Kelurahan Rowosari dan Kelurahan Meteseh dengan skor sedang untuk pemeliharaan.

4.4.2.1. Persepsi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan

Pada sub bab ini dikaji beberapa persepsi masyarakat di segmen tengah DAS Babon. Di samping itu secara khusus dipaparkan persepsi dan partisipasi masyarakat di segmen tengah dalam pelaksanaan kegiatan program penanaman pohon jati super di DAS Babon. Persepsi dan partisipasi masyarakat meliputi kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan secara umum maupun pembangunan hutan desa dengan penanaman jati super di sekitar DAS Babon, dan beberapa aspek yang terkait dengan persepsi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Berdasarkan hal penelitian, kelompok tani merupakan telah mempunyai persepsi yang sama dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan pada masing-

masing kelompok tani di kelurahan telah berjalan sesuai kesepakatan anggota kelompok yang tertuang dalam perencanaan kegiatan sebelumnya.

4.4.2.2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan program pemulihan kualitas lingkungan DAS Babon dilakukan antara lain melalui pembangunan hutan desa oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat telah mampu melaksanakan kegiatan secara mandiri pada masing-masing kelompok tani melakukan kerja bakti dalam pembersihan lahan dan pembuatan lubang sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Kegiatan yang dilakukan masyarakat mulai dari pembersihan lahan, pembuatan lubang hingga penanaman pohon jati super di lokasi yang telah disepakati merupakan inisiatif yang datang dari masyarakat petani itu sendiri. Dari hasil penelitian masyarakat petani hanya diberi bantuan pendanaan oleh pemerintah dalam pembuatan lubang dan pembuatan bronjong. Kelompok tani telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

A. Keberhasilan Pelaksanaan Partisipatif

Pelaksanaan program penanaman jati super merupakan bentuk partisipasi nyata masyarakat melalui pembersihan lahan, pembuatan lubang dan penanaman jati super yang telah dilakukan oleh kelompok tani. Hal ini merupakan perwujudan partisipasi masyarakat.

Masyarakat telah mampu menggalang kebersamaan melalui pelaksanaan penanaman jati super sesuai jadwal yang telah mereka tetapkan sendiri. Hal ini dibuktikan dengan upaya gotong royong nyata oleh masyarakat. Masyarakat bergotong royong dalam pembuatan lubang dan pembersihan lahan. Melalui wawancara dengan Mariono (Kasi. Pembangunan Kelurahan Bulusan), pada tanggal 29 Juni 2003, peneliti mendapatkan kesan bahwa mereka mampu menggalang kebersamaan berkat peran aktif tokoh masyarakat dalam pertemuan rutin yang dilanjutkan dengan perawatan tanaman melalui pembersihan lahan dan penyiraman.

Pada kelompok tani "Sederhana" Kelurahan Bulusan telah mampu melakukan swakelola, namun pada kelompok tani di kedua kelurahan, masyarakat masih belum mampu untuk swakelola.

B. Kendala Pelaksanaan Partisipatif

Hasil pengamatan peneliti telah terjadi pergeseran nilai pola perilaku sosial budaya di lingkungan kehidupan masyarakat tersebut. Kebiasaan kegiatan gotong royong dan sukarela cenderung mengalami pengikisan, sehingga kadang-kadang terjadi kesulitan dalam menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kerja bakti dan gotong royong seperti : pengolahan tanah, pembuatan lobang tanam juga pemeliharaan tanaman masih rendah. Berdasarkan pengamatan peneliti untuk kelompok tani di Kelurahan Meteseh paling rendah dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga keberhasilan dari pertumbuhan tanaman hanya 85 % dan ditemukan tanaman tidak berkembang dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 29 Juni 2003 dengan Untung, BA (Sekretaris Lurah Meteseh) :

“Masyarakat kesulitan merawat tanaman disebabkan banyak kendala yang dihadapi selain kurangnya pertemuan anggota kelompok tani, juga rendahnya kualitas tanah tempat tumbuh. Juga sulitnya mendapat sumber air bagi penyiraman tanaman pada musim kemarau.”

Pelaksanaan kegiatan pembangunan hutan desa di Kota Semarang tidak lepas pula menghadapi beberapa kendala yang diperkirakan dapat mempengaruhi keberhasilan dari program ini. Kendala ini pada umumnya berkaitan dengan aspek pendanaan dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pelaksanaan. Dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah hanya merupakan stimuli bagi kegiatan tersebut. Masyarakat diharapkan mampu melakukan swakelola dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Hasil pengamatan peneliti masyarakat terbiasa mendapatkan bantuan dari pemerintah, sehingga mereka sulit untuk melakukan swakelola dalam pendanaan. Kerbatasan anggaran dalam pelaksanaan merupakan salah satu kendala yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan hutan desa, karena masyarakat belum mampu sepenuhnya untuk melakukan swakelola.

4.4.3. Tahap Monitoring dan Evaluasi

A. Keterlibatan Masyarakat dalam Monitoring dan Evaluasi

Keberhasilan ataupun kegagalan suatu perencanaan yang partisipatif sangat tergantung pada partisipasi masyarakat itu sendiri, artinya apakah masyarakat mempunyai respon positif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan tanaman jati super di daerahnya.

Dalam kegiatan pembangunan hutan desa di daerah penelitian, tampak masyarakat aktif terlibat di dalamnya perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan tanaman jati super. Masyarakat berupaya ikut memberikan kontribusi baik tenaga maupun material menurut kemampuannya. Misalnya dalam implementasi program penanaman jati super di segmen tengah DAS Babon oleh masyarakat di 3 (tiga) kelurahan. Dalam program ini masyarakat berperan aktif mulai dari perencanaan awal, pengambilan keputusan atas alternatif rencana yang akan dilaksanakan hingga pelaksanaan. Kenyataan mereka juga aktif dalam pengawasan dan penentuan besar bagi hasil dan pengguliran dana. Tingginya kesadaran masyarakat dalam berperan aktif tidak terlepas dari dorongan dan motivasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang maupun Pemerintah Desa setempat. Melalui lembaga formal dan lembaga-lembaga informal yang ada di masyarakat seperti LKMD, Karang Taruna dan lembaga informal lainnya masyarakat ikut berperan aktif.

Pemerintah desa setempat melalui peran ketua kelompok yang dibentuk secara informal hasil kesepakatan anggota kelompok juga cukup aktif membina masyarakatnya..

Kelompok Tani "Sederhana" Kelurahan Bulusan selalu melakukan pertemuan anggota secara rutin tiap 35 (tiga puluh lima) hari pada hari Ahad, sedangkan perawatan rutin tiap dua minggu sekali dilakukan penyiraman bersama secara gotong royong. Hasil pertemuan warga Kelurahan Bulusan tertuang di dalam notulen rapat koordinasi petani jati super pada tanggal 1 Juni 2003 (terlampir) dipimpin oleh ketua petani jati super bapak Karjono. Menurut Bapak Ir. Ali Ikhwan pada tanggal 29 Juni 2003 sebagai Ketua kelompok 2/B Kelurahan Bulusan mengemukakan dalam wawancara dengan peneliti bahwa :

“warga menginginkan terbentuknya koperasi petani jati super untuk mendukung operasional perawatan dan kesejahteraan petani, dan juga menetapkan biaya Rp. 2.000.000,- bagi pohon yang terkena penebangan ” .

Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada perencanaan saja, namun juga dalam melakukan evaluasi kegiatan. Perencanaan dan evaluasi merupakan suatu proses yang terus menerus, berawal dari perencanaan, implementasi (action), evaluasi dan perencanaan kembali.

Seperti dikemukakan Nurweni, SH (Kabid Penanganan Kasus Bapedalda Kota Semarang, Pimpro. Hutan Desa) berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 7 Juli 2003:

“evaluasi sangat penting untuk dilakukan bersama dengan masyarakat petani, sebagai langkah perencanaan kegiatan selanjutnya, masyarakat perlu mendapat motivasi dan memberikan informasi semua pelaksanaan yang ada dilapangan”.

Evaluasi pelaksanaan penanaman jati super di segmen tengah DAS Babon dapat dilihat dalam tabel 13.

Lingkup partisipasi masyarakat di segmen tengah DAS Babon ini harus dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi yang terkait dengan pengelolaan daerah sekitar aliran DAS Babon dan partisipasi di luar pengelolaan DAS Babon.

Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi ini pada umumnya diwujudkan secara gotong-royong dengan perawatan tanaman maupun penyiraman. Di Kelurahan Bulusan keterlibatan masyarakat yang terlibat cukup tinggi. Pembuatan laporan rutin tiap bulan dilakukan oleh Petani Sederhana Kelurahan Bulusan, juga ada pertemuan rutin yang membahas permasalahan-permasalahan di lapangan. Masyarakat petani telah melakukan upaya-upaya swadaya masyarakat melalui kegiatan gotong-royong. Intensitas kegiatan gotong-royong dalam partisipasi di DAS Babon untuk Kelurahan Rowosari dan Kelurahan Meteseh masih rendah, jika dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan di Kelurahan Bulusan. Melalui pertemuan rutin yang dilakukan petani sederhana secara bergilir oleh anggota kelompok menguatkan kelembagaan kelompok petani.

B. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan bentuk partisipasi nyata yang ada di masyarakat. Melalui upaya kelembagaan masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi demi keberhasilan program, dan ini sangat ditentukan oleh meningkatnya partisipasi masyarakat. Masyarakat telah mampu terlibat menjaga dan merawat serta menggalang kebersamaan melalui kegiatan perawatan dan pelaporan. Kegiatan melalui pertemuan rutin yang dilakukan di Kelurahan Bulusan, dengan agenda pertemuan melakukan penyiraman dan perawatan tanaman jati di waktu musim kemarau.

Upaya gotong royong oleh masyarakat di Kelurahan Bulusan dengan nama Kelompok Tani “Sederhana” lebih menonjol dibandingkan pada kedua kelurahan lainnya. Keberhasilan monitoring dan evaluasi nampak dari adanya komunikasi yang terjalin di masyarakat. Komunikasi antar anggota kelompok lebih disebabkan oleh adanya peran dari pemimpin informal di masyarakat itu sendiri.

4.4.4. Evaluasi Program Pembangunan Hutan Desa

Evaluasi program pembangunan hutan desa di Kota Semarang tidak lepas pula menghadapi beberapa kendala yang diperkirakan dapat mempengaruhi keberhasilan dari program ini. Kendala ini berkaitan dengan lima aspek : yaitu aspek hukum dan peraturan, aspek manajemen dan organisasi, aspek pembiayaan, aspek teknis operasional dan aspek partisipatif sosial budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat kota atau lokal. Sejauh ini hasil pengamatan peneliti menemukan bahwa kemampuan sumber daya manusia dalam memenuhi kelima aspek tersebut dalam upaya monitoring dan evaluasi untuk Kelurahan Bulusan cukup baik, namun untuk Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Rowosari masih rendah, seperti terlihat dari keterlibatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada tabel 13

TABEL 13
EVALUASI PELAKSANAAN PENANAMAN JATI SUPER SEGMENT TENGAH DAS BABON
DARI HASIL FOCUS GROUPDISCUSSION (FGD)

No	TAHAP	VARIABEL																				IMPLEMENTASI (KETERLIBATAN)			MANFAAT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		INISIATIF/PRAKARSA									PENDEKATAN			SUMBER DANA (KONTRIBUSI)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		IDE			PEMAHAMAN			HARAPAN			MUSYAWARAH		P	M	S	Bl.	Mt.	Rw.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		P	M	S	Bl	Mt.	Rw.	Bl	Mt.	Rw.	Ya	Tdk.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
I.	Perencanaan Program																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Keterangan :
P = Pemerintah; M = Masyarakat; S = Swasta; Bl. = Bulusan; Mt = Meteseh; Rw = Rowosari
Skala Likert : 1. Rendah; 2. Sedang; 3. Tinggi;

4.4.5. Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Penguatan kelembagaan di masyarakat sangat penting artinya bagi keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi dalam suatu program. Dari hasil penelitian, maka perlu dikaji aspek yang mempengaruhi penguatan kelembagaan di masyarakat yaitu sebagai berikut :

4.4.5.1. Aspek Hukum dan Peraturan

Hukum dan peraturan merupakan perangkat yang mengikat para anggotanya, sedangkan menurut sifatnya hukum terdapat dua sifat yaitu formal dan informal. Hukum formal yaitu hukum yang telah di undangkan dan ada di dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997. Sedangkan yang informal yaitu kesepakatan yang dibangun oleh kelompok masyarakat itu sendiri.

Masyarakat petani di Kelurahan Bulusan telah mampu membuat aturan yang disepakati oleh anggotanya. Sedangkan untuk Kelurahan Rowosari dan Kelurahan Meteseh belum ada, secara tertulis. Aturan hukum informal yang ada di Kelurahan Bulusan yaitu adanya kesepakatan penggantian nilai tanaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bagi yang menggunakan tempat tumbuhnya tanaman jati bagi kegiatan lain. Kesepakatan hukum informal yang dibangun oleh kelompok di dalam masyarakat akan lebih mudah dipahami oleh kelompok masyarakat itu sendiri, sehingga aspek hukum formal dan informal saling bersinergi di dalam penguatan kelembagaan yang dibangun oleh masyarakat petani dalam pembangunan hutan desa.

4.4.5.2. Aspek Manajemen dan Organisasi

Terbentuknya keanggotaan dalam awal program melalui perencanaan partisipatif menghasilkan kegiatan yang nyata di masyarakat petani. Pertemuan rutin yang diselenggarakan kelompok masyarakat di kelurahan-kelurahan tersebut merupakan indikator adanya fungsi manajemen pada kelompok masyarakat tersebut.

Walaupun dalam masing-masing kelompok berbeda dalam pengelolaannya namun yang sangat jelas menurut pengamatan penelitian bahwa di Kelurahan Bulusan lebih menonjol, sehingga penerapan manajemen dalam

penggorganisasian cukup baik jika dibandingkan dengan kelompok tani di Kelurahan Rowosari dan Kelurahan Meteseh. Di Kelurahan Rowosari dan Kelurahan Meteseh tidak aktif, karena pertemuan tidak dilakukan secara rutin, tetapi hanya kalau terjadi permasalahan saja.

4.4.5.3. Aspek Pembiayaan

Pendanaan dalam upaya perawatan tanaman dilakukan dengan swadaya masyarakat murni. Masyarakat mampu mengadakan pertemuan rutin anggota kelompok dengan mengeluarkan makanan kecil bagi tuan rumah yang dilakukan secara sederhana. Pada setiap pertemuan pasti dikumpulkan uang dengan besaran yang telah disepakati, sebagai kas dari kelompok. Seperti yang dikemukakan Ir. Ali Ickwan pada tanggal 29 Juni 2003 :

“setiap pertemuan para anggota menyetor uang sebesar Rp. 5000,- sebagai kas, adapun penggunaannya untuk keperluan pembentukan koperasi dan perawatan tanaman, sedangkan pengumpulan dana secara musyawarah merupakan hal yang sangat penting sebagai wujud rasa tanggungjawab kelompok”.

4.4.5.4. Aspek Teknis Operasional

Pembahasan pengelolaan lingkungan berupa kebersihan dan perawatan tanaman jati super dilakukan dalam acara pertemuan rutin. Bagi anggota yang menguasai salah satu bidang teknis diberi kesempatan untuk berbicara dan anggota mendengarkan, sekali-kali memberi pertanyaan apabila tidak paham.

Aspek teknis operasional lebih banyak dibahas dalam bentuk pertukaran ide/gagasan, sehingga nantinya mampu memecahkan masalah yang terjadi di lapangan. Hasil pengamatan peneliti untuk tanaman jati super yang ada di Kelurahan Rowosari banyak daunnya yang termakan ulat, sedangkan di Kelurahan Meteseh tanaman tumbuh kerdil. Hal ini semestinya dapat ditanggulangi apabila anggota di dalam kelompok secara teknis mampu melakukan pembersihan lahan dan penyemprotan tanaman, tentunya dengan bahan yang akrab lingkungan juga perlu adanya pemupukan agar tanaman itu sehat dari serangan hama. Pengamatan peneliti di kelompok tani Kelurahan Bulusan tumbuh baik, dikarenakan pemupukan dan pembersihan lahan dilakukan secara bergotong royong oleh masyarakat tani.

4.4.5.5. Aspek Partisipatif

Menurut pengamatan peneliti masyarakat di Kelurahan Bulusan sebagai kelompok tani telah melakukannya dengan baik, melalui kegiatan rutin setiap minggu melakukan upaya pembersihan lahan dan penyiraman. Mereka dalam pertemuan rutin telah merencanakan pembibitan tanaman jati super yang akan dilakukan sendiri, sebagai upaya penanaman kembali lahan-lahan yang masih kosong. Kemandirian dengan melakukan swadaya masyarakat merupakan inisiatif kelompok masyarakat itu sendiri.

Kegiatan yang dilakukan kelompok tani “Sederhana” di Kelurahan Bulusan lebih menonjol dan terkoordinasi cukup baik. Mereka melakukan kerja bakti secara bergiliran, juga diadakan pertemuan sesama anggota tani secara bergiliran setiap 35 hari. Sedangkan konsumsi dibebankan pada iuran setiap anggota. Pertemuan berkala sangat menunjang keberhasilan suatu program dalam mengevaluasi semua kegiatan yang telah dilakukan dan merencanakan sesuatu pada masa yang akan datang.

4.4.5.6. Strategi Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Partisipatif.

Pentingnya pengembangan suatu model strategis yang ideal jelas tampak apabila diingat bahwa model itu memberikan kepada organisasi pengetahuan dan keterampilan untuk “bergerak” dari suatu pendekatan reaktif ke pendekatan proaktif. Tahap ini memusatkan perhatian pada norma-norma yang bersifat semesta dan mendasar bagi organisasi, kebijaksanaan dan struktur organisasi yang bersangkutan. (Sondang P. Siagian, 2000).

Di dalam pengembangan organisasi masyarakat perlu dilakukan komunikasi guna diperoleh umpan balik tentang efektif tidaknya berbagai bentuk intervensi yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program. Pemahaman tentang perlu diketahuinya berbagai hal seperti kepemimpinan, komunikasi, proses pengambilan keputusan, hubungan antar anggota kelompok tani dan kepuasan kerja kelompok.

Menurut Hadi (2001), kunci dari gagasan perencanaan transaktif atau pembelajaran sosial adalah evolusi desentralisasi dan membantu orang-orang untuk memperoleh akses positif, dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan. Bapedalda Kota Semarang sebagai instansi pemerintah dalam menentukan perencanaan dan pengelolaan DAS Babon khususnya untuk program

pemulihan lingkungan melalui pembangunan hutan desa, disarankan agar dalam penyusunan perencanaan dapat memperhatikan langkah-langkah perencanaan yang dapat melestarikan lingkungan.

Melalui pendekatan 7 (tujuh) langkah perencanaan yang dikenal dengan sebutan *the seven magic steps of planning*, yang dimulai dari merumuskan masalah, menetapkan tujuan, analisis kondisi, mencari alternatif solusi, memilih alternatif terbaik, mengkaji alternatif pilihan dan mengimplementasikan dalam pengambilan keputusan, harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan *the seven magic steps of planning*, diharapkan akan memperoleh suatu model pengelolaan lingkungan DAS yang dapat dikembangkan dalam upaya penangan DAS Babon Kota Semarang.

Penerapan masing-masing unsur dari ketujuh langkah perencanaan di atas agar diperoleh suatu perencanaan yang baik, maka didasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara diperoleh gambaran sebagai berikut :

1. Merumuskan masalah

Maka dapat dirumuskan masalah pemanfaatan lahan-lahan terlantar dan konservasi lahan kritis di DAS. Agar berdayaguna bagi masyarakat maka perlu diadakan penanaman pohon dan dapat menghasilkan secara ekonomi dengan pelibatan masyarakat.

2. Menetapkan tujuan

Melestarikan lingkungan DAS khususnya DAS Babon sebagai salah satu fungsi air (ketersediaan air) Kota Semarang bagian Timur serta meningkatkan ekonomi rakyat dengan menjadikan lingkungan DAS sebagai lahan konservasi yang mempunyai nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar.

3. Analisa Kondisi

DAS Babon belum dikelola dengan baik, karena pengelolaan masih bersifat parsial. Hal ini disebabkan DAS Babon melewati 3 daerah otonom yaitu : Kota Semarang, Kabupaten Ungaran dan Kabupaten Demak.

Penanganan melalui koordinasi antar kota melalui pemberdayaan masyarakat DAS akan sangat penting untuk mengatasi permasalahan DAS Babon yang sangat kompleks.

4. Mencari alternatif solusi

Alternatif solusi melalui pemanfaatan DAS dengan upaya konservasi lahan melalui penanaman kembali lahan-lahan yang tidak produktif dengan tanaman produktif. Pengelolaan tanaman sebagai tanaman produksi sekaligus ekonomis dilakukan secara demokratis melalui keinginan masyarakat itu sendiri. Masyarakat menginginkan tanaman yang ditanam di DAS dapat bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Sedangkan bagi instansi teknis yang menangani DAS dalam hal ini PU Jaratunseluna, tidak membolehkan tanaman keras yang ditanam dekat dengan DAS. Melalui pendekatan *focus group discussion* terbentuklah kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan bersama, maka terdapat solusi yang disepakati bersama.

5. Memilih alternatif terbaik

Dari beberapa alternatif yang ditemukan di lapangan, maka ditetapkan alternatif yang terbaik dari perencanaan partisipatif dalam upaya penguatan kelembagaan masyarakat melalui FGD. Dimana masyarakat diberi kesempatan yang sama untuk menjadi anggota dalam pengelolaan lingkungan. Peran pemerintah dalam hal ini Bapedalda Kota Semarang sebagai instansi teknis pengelolaan lingkungan hidup hanya sebagai fasilitator.

6. Mengkaji alternatif pilihan

Alternatif yang terpilih dengan adanya pemberdayaan masyarakat di DAS Babon melalui pembentukan kelompok penanam jati super. Perlu adanya alternatif tanaman lain yang tidak terlalu lama panen seperti empon-empon, sehingga aktifitas masyarakat tetap dalam koridor pengelolaan lingkungan DAS.

7. Mengimplementasikan

Upaya pengelolaan lingkungan DAS Babon serta keterlibatan masyarakat lokal dengan adanya kemitraan dengan *stakeholders* mampu menjalin komunikasi antar kelompok, sebagai upaya penguatan kelembagaan masyarakat petani jati super. Hasil kebijakan pengelolaan lingkungan perlu disosialisasikan, sehingga masyarakat merasa memiliki potensi alam yang ada di lingkungannya, khususnya melalui konservasi lahan di DAS Babon sebagai cadangan kebutuhan air Kota Semarang maupun pengurangan bahaya banjir di musim penghujan untuk daerah hilir.

4.4.6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat petani jati super dapat terus ditingkatkan dengan adanya program pembangunan hutan desa yang berkesinambungan. Kemandirian yang ada di masyarakat merupakan kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat selalu diajak untuk duduk bersama membicarakan program tindak lanjut dan mendorong masyarakat untuk lebih memperluas jangkauan program kepada masyarakat lain diluar kelompok tani. Partisipasi aktif para anggota kelompok tani dalam pertemuan rutin yang diadakan para anggota memberi gambaran dari adanya komunikasi antar anggota masyarakat.

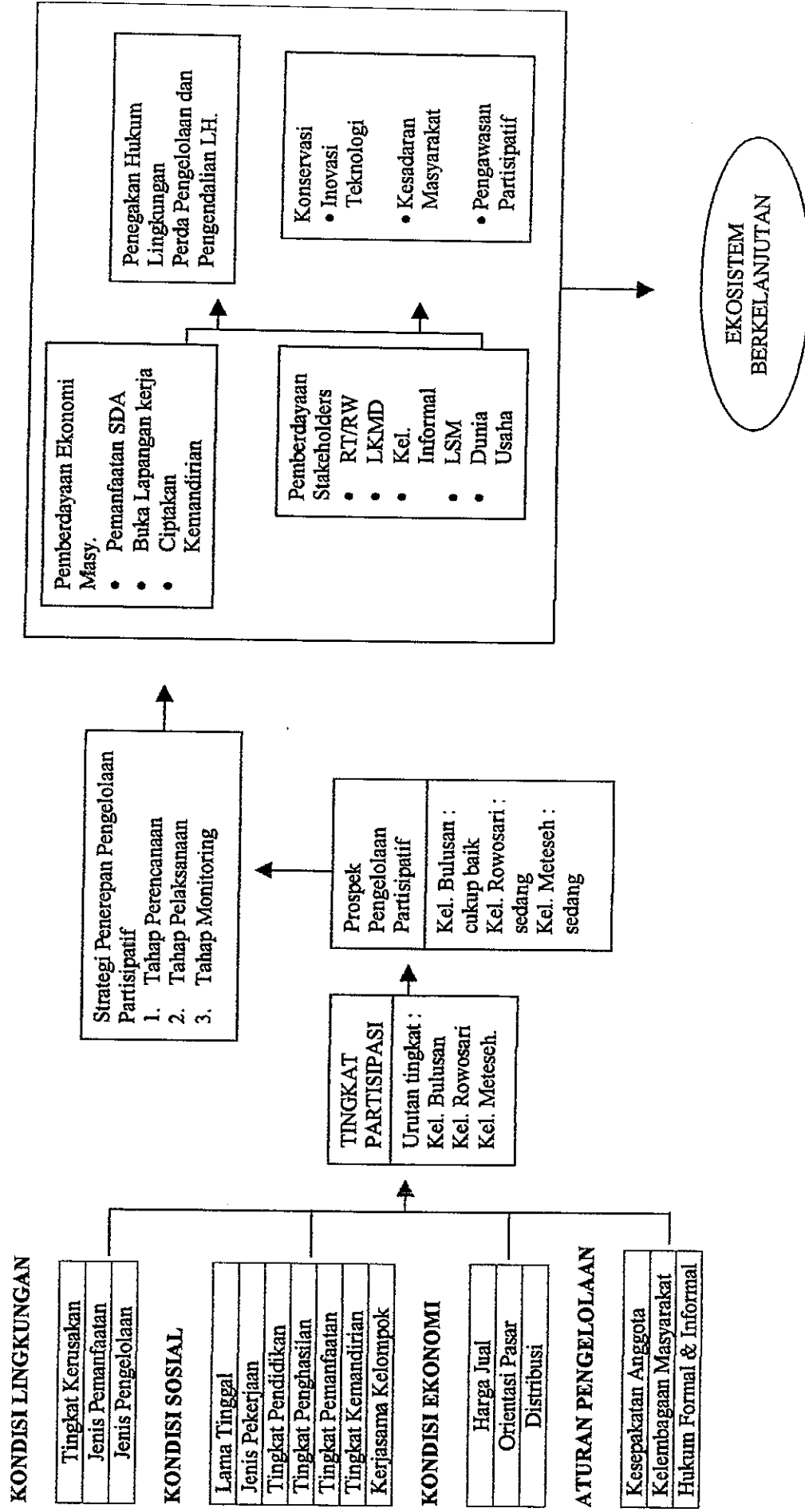
Partisipasi melalui pertemuan rutin yang dilakukan anggota Kelompok Tani “Sederhana” Kelurahan Bulusan merupakan sarana terpenting untuk dapat memotivasi anggotanya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat petani. Hasil pertemuan rutin tersebut dapat diimplementasikan melalui kegiatan seperti perawatan tanaman, pembibitan maupun penanaman empon-empon di sekitar tanaman jati. Anggota petani mampu menuangkan gagasan atau ide dalam setiap pertemuan yang diadakan. Melalui pertukaran ide/gagasan maka akan melahirkan suatu kebersamaan antar anggota kelompok dan dapat melakukan evaluasi untuk perencanaan kegiatan selanjutnya.

4.4.7. Penguatan Kelembagaan dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat.

Kelembagaan yang terbangun di masyarakat berdasarkan 8 (delapan) tangga tingkat partisipasi masyarakat, dalam penelitian terlihat bahwa apabila dalam penelitian semua parameter masuk kategori baik maka masyarakat telah mencapai tingkatan tangga tertinggi dalam proses pengambilan keputusan. Melalui kelompok petani masyarakat segmen tengah DAS Babon masuk dalam tingkat ke-7 (tujuh), masyarakat telah diberi kekuasaan untuk sebagian program. Masyarakat dalam hal ini kelompok-kelompok tani setempat telah berhasil dalam upaya penguatan kelembagaan yang mereka bentuk sendiri. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian berikut ini :

- A. Partisipasi masyarakat di Kelurahan Bulusan dari hasil analisis cukup tinggi, keberhasilan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dan monitoring telah dilakukan dalam bentuk partisipatif. Semua aspek memenuhi syarat sehingga menyebabkan tingkat partisipasi anggota kelompok tani masyarakat di Kelurahan Bulusan cukup berhasil dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- B. Partisipasi masyarakat di Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Rowosari dari hasil analisis masuk kategori sedang namun ada beberapa parameter masih perlu ditingkatkan. Menurut pengamatan peneliti disebabkan tidak adanya komunikasi yang terjalin antar anggota kelompok tani, sedangkan tidak adanya pemimpin informal di masyarakat sebagai motivator salah satu penyebab tidak dilakukannya pertemuan rutin oleh anggota kelompok tani tersebut. Hasil wawancara peneliti terkesan bahwa karena kesibukan anggotanya maka pertemuan kelompok banyak menjadi kendala. Namun demikian hubungan antar anggota kelompok masih terjalin secara individu. Komunikasi antar anggota masyarakat juga masih terjalin dengan baik. Hasil penelitian terhadap partisipasi masyarakat di segemen tengah DAS Babon menjadi acuan dalam strategi pembuatan model. Hasil kajian peneliti, maka perlu adanya suatu model perencanaan partisipatif dalam upaya penguatan kelembagaan masyarakat yang ada di segmen tengah DAS Babon Kota Semarang.

DIAGRAM 2
MODEL PENGELOLAAN LINGKUNGAN PARTISIPATIF SEGMENT TENGAH DAS BABON



4.4.8. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Peningkatan ekonomi masyarakat di segemen tengah DAS Babon merupakan awal dari kerjasama dalam manajemen partisipatif. Manajemen partisipatif tidak memandang masyarakat sebagai obyek yang dimanfaatkan untuk kepentingan program pihak-pihak tertentu sementara tujuan dasar dari masyarakat, yakni untuk mendapat kehidupan yang lebih baik terabaikan. Kondisi dilapangan anggota kelompok tani yang terlibat sangat aktif dalam semua kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. Kesediaan berkerjasama dikarenakan adanya upaya peningkatan ekonomi dari hasil penanaman pohon jati super.

Oleh karena itu potensi sumber daya alam yang ada di Sungai Babon diharapkan dapat menjadi media bagi masyarakat yang dilibatkan dalam anggota kelompok petani penanam jati super untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Adapun target keberhasilan pada sistem ini dapat diukur dari beberapa indikator ekonomi seperti : peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan jumlah tenaga penganggur dan kemandirian masyarakat dan semakin terbukanya lapangan pekerjaan. Salah satu program pengembangan ekonomi masyarakat yaitu upaya penanaman pohon produktif , yang bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

4.4.9. Pemberdayaan *stakeholders*

Pemberdayaan *stakeholders* menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem peningkatan ekonomi masyarakat. Hasil yang diharapkan dari sistem ini adalah *stakeholders* bisa terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi penanaman pohon jati super dalam program hutan desa. Pemberdayaan *stakeholders* diharapkan dapat menghasilkan komitmen bersama dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan DAS Babon, berdasarkan aturan yang disepakati sebelumnya untuk itu diperlukan bentuk pemberdayaan *stakeholders* yang berkelanjutan, sehingga diperlukan yaitu :

- Adanya wadah partisipasi yang terbentuk dalam suatu wadah keanggotaan di masyarakat lokal;
- Adanya sistem komunikasi secara formal maupun informal di anggota kelompok tersebut;

- Adanya hubungan di luar komunitas yang bermanfaat untuk memberikan masukan finansial, dukungan politis, sumber pengetahuan dan dukungan teknis.
- Adanya kontrol masyarakat terhadap keputusan-keputusan yang dibuat.

4.5.0. Perlindungan Alam dan Sumberdaya

Perlindungan alam adalah konsekuensi dari keberhasilan peningkatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan *stakeholders* dalam pemanfaatan potensi DAS Babon. Hasil yang diharapkan yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang termotivasi karena adanya upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan demikian terciptanya sistem yang efisien untuk merespon keterbatasan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan. Tolok ukur dalam sistem perlindungan alam ini adalah :

- Adanya pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat;
- Terciptanya kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan;
- Konservasi lahan-lahan kritis melalui usaha penanaman pohon.

4.5.1. Penegakan hukum lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan adalah muara akhir dari terlaksananya ketiga sistem di atas. Hasil ideal yang diharapkan dari sistem ini adalah operasionalnya hukum lingkungan yang mengatur pihak-pihak untuk mentaati aturan-aturan pengelolaan lingkungan yang ada. Desakan masyarakat yang menuntut keadilan karena pelanggaran suatu pihak dapat mengakibatkan timbulnya keresahan. Perlu adanya sanksi maupun penghargaan yang diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam upaya pembangunan hutan desa.

4.6. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan penelitian meliputi keterbatasan metodologis dan keterbatasan pencapaian outcome yang diharapkan dari pengelolaan lingkungan yang partisipatif di segmen tengah DAS Babon. Adapun keterbatasan tersebut selengkapya adalah sebagai berikut :

4.6.1. Keterbatasan Metodologis.

- a. Cukup banyak variabel-variabel yang bersifat kualitatif yang tidak mungkin untuk dikuantitatifkan, terutama pada atribut aturan pengelolaan seperti variabel pengelolaan. Sementara itu dalam penelitian ini digunakan alur berpikir yang hanya representatif untuk mengkaji hubungan sebab-akibat yang nyata dan langsung. Oleh karena itu dimungkinkan terdapat variabel lain yang sebenarnya terkait tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat dan tidak langsung;
- b. Variabel-variabel yang bersifat kuantitatif terkelompok dalam populasi yang relatif homogen dan relatif kecil hanya sebagai data pendukung, sehingga populasinya tidak signifikan.

4.6.2. Keterbatasan Mencapai *Outcome* Manajemaen Partisipatif

Hasil penelitian ini efektif menjadi dasar untuk melakukan reorientasi program dan menjadi dasar lebih jauh untuk merumuskan model manajemen partisipatif. Pembuatan model tersebut diharapkan terciptanya peningkatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan *stakeholders*, perlindungan alam dan penegakan hukum lingkungan. Model penelitian yang hendak dikembangkan oleh peneliti yaitu model penelitian partisipatif (*participatory action research*), tetapi yang digunakan penelitian bersifat eksploratif untuk melakukan verifikasi terhadap suatu teori dan konsep yang berkembang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan lingkungan hutan desa oleh pemerintah dalam hal ini Bapedalda di ketiga daerah penelitian dalam pengelolaan lingkungan khususnya dalam program hutan desa melalui penanaman jati super sudah merupakan upaya pengelolaan lingkungan yang partisipatif melalui tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap monitoring & evaluasi. Identifikasi terhadap segala bentuk partisipasi masyarakat pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring & evaluasi sudah menunjukkan suatu bentuk nyata peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan segmen tengah DAS Babon. Kesenjangan partisipasi masyarakat dapat diperkecil apabila masyarakat dilibatkan sejak dini dalam suatu program pemerintah. Pemerintah hanya memberikan stimuli kepada kelompok masyarakat sehingga masyarakat mampu melanjutkan program secara mandiri dengan swakelola.
2. Pengelolaan lingkungan hutan desa melalui partisipasi masyarakat di wilayah penelitian, hal ini disebabkan oleh keaktifan anggota kelompok yang terbentuk dalam kelompok tani di tiga kelurahan. Faktor komunikasi merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan kegiatan maupun monitoring dan evaluasi. Pada kelompok tani "Sederhana" di Kelurahan Bulusan partisipasi masyarakat lebih menonjol jika dibandingkan 2 (dua) kelompok tani lainnya, disebabkan adanya kepemimpinan yang berkembang di masyarakat lokal. Hal ini dapat membantu terciptanya suatu sistem kelembagaan yang baik, sehingga lebih memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Nilai positif : masyarakat telah diajak terlibat dalam keanggotaan kelompok sehingga masyarakat melalui keanggotaan kelompok tani telah turut serta di dalam menentukan masa depan dari program tersebut yaitu :

- munculnya komunikasi dua arah dari pemerintah dan masyarakat;
- terbentuknya kepemimpinan lokal di masyarakat.

Negatif : Tingkat partisipasi masyarakat belum pada tingkat aplikasi di lapangan, karena program tersebut membutuhkan waktu yang lama.

3. Pengelolaan lingkungan hutan desa sebagai upaya penguatan kelembagaan di masyarakat sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Pembentukan kelompok-kelompok kecil informal dengan pembentukan kelompok tani sebagai wadah kelembagaan masyarakat. Pengelolaan lingkungan DAS Babon melalui kelompok tani lebih berpengaruh sebagai motor penggerak yang semakin lama semakin meluas di masyarakat, daripada melakukan program dalam skala besar tanpa adanya kelembagaan pengelolaan di masyarakat.

Nilai positif : masyarakat atau anggota kelompok dapat bertanggung jawab kepada kelompoknya dengan aturan main yang dibuatnya sendiri.

Nilai negatif : masih rendahnya komitmen lembaga-lembaga formal yang ada dalam meningkatkan aktifitas kelembagaan informal yang berkembang di masyarakat.

4. Pengelolaan lingkungan hutan desa dalam strategi pengelolaan lingkungan DAS yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat masih lemah. Pengelolaan DAS hanya bersifat parsial terbatas hanya program yang berorientasi pada proyek dan terbatas pada penanganan masalah fisik, belum menyentuh pada keberadaan komunitas masyarakat lokal pengelola lingkungan hidup.

5.2. SARAN

Berdasarkan evaluasi terhadap program hutan desa sebagai salah satu program pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam di Kota Semarang dapat berhasil apabila telah memenuhi norma-norma perencanaan yang ideal melalui perencanaan yang partisipatif. Pendekatan melalui partisipasi masyarakat merupakan pendekatan terhadap program dengan keterlibatan masyarakat sejak dini. Oleh karena itu studi ini menghasilkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah sebagai fasilitator perlu melakukan pemberdayaan *stakeholders* dalam membina kelembagaan yang ada di masyarakat. Keberlanjutan program pemerintah dalam membina kelembagaan yang ada di masyarakat, harus selalu menjalin kerjasama melalui program-program lanjutan dengan mendorong kemandirian kelembagaan yang telah terbentuk di masyarakat.

2. Keberlanjutan suatu program perlu ditunjang oleh partisipasi masyarakat sejak dini . Pendekatan dengan strategi *bottom-up* diwujudkan melalui konsep manajemen partisipatif. Manajemen partisipatif yang akan dikembangkan dalam pengelolaan lingkungan Sungai Babon yaitu menghendaki partisipasi aktif dari semua *stakeholders* (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha), sehingga tercapainya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.
3. Perlu adanya peningkatan perekonomian kelompok tani dalam pengelolaan lingkungan DAS Babon. Dengan perencanaan yang partisipatif diharapkan mampu merangsang partisipasi masyarakat, karena yang dikembangkan tersebut diawali dengan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya DAS Babon. Pendekatan tersebut akan menjamin pembagian peran bagi semua *stakeholders* untuk dapat menikmati hasil dari pengelolaan lingkungan khususnya upaya penanaman jati super yang telah dilakukan bersama dengan masyarakat. Di samping itu perlu identifikasi bagaimana investasi, produksi dan distribusi dari pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat.
4. Strategi pengelolaan DAS perlu dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan oleh kelompok tani sebagai komunitas lokal. Kelompok tani dikembangkan dalam pengelolaan lingkungan sebagai pengawas lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup menuju ekosistem yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Ritonga, (et al). (2001). "Kependudukan dan Lingkungan Hidup". Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta;
- Agus Salim. (2002). "Perubahan Sosial : Sketsa, Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia". Tiara Wacana. Yogyakarta;
- Andi Oetomo. (1997). "Konsepsi dan Implikasi Penerapan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang di Indonesia". Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol 8 No. 7;
- Bappedal Propinsi Jawa Tengah, 2002, "Penyusunan Profil Lingkungan DAS Babon di Jawa Tengah", Semarang;
- Barry Cheekoway : "Six Strategies of Community", Development Journal; Januari; 1995, vol.30, NO. 1, page 2-20;
- Britha Mikkelsen. (2001). "Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan". Yayasan Obor Indonesia. Jakarta;
- Bruce Mitchel, (et al), (2000). "Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan". Gadjah Mada University Press. Yogyakarta;
- Chris W. William ; "Partnership, Power and Participation" The United Nation Center for Human Sattlement, Vol. 3 No.5, March, 1997;
- DPU Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah, 1996, "Industrial Waste Study For Semarang Surakarta", Semarang;
- James L. Gibson, (et al), (1982), "Organisasi dan Manajemen : Perilaku, Struktur, Proses". Erlangga. Jakarta;
- Jean Aden, (1998). "A Rapid Appraisal of Industrial Pollutan Abatement In Semarang. Indonesia Issues and Opportunities", Environmental Sector Unit. The World Bank;
- Julian Brannen, (1996). "Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, (2002), "Pengelolaan Lingkungan Sosial", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta;
- Koesnadi Hardjasoemantri. (2001), "Hukum Tata Lingkungan". Gadjah Mada University Press, Yogyakarta;

- Kusbiantoro, BS. (1998), "Peluang Kerjasama Luar Negeri di Bidang Pembangunan Perkotaan, Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Bantuan Luar Negeri dalam Pembangunan Perkotaan", Bandung.
- Lexy J. Moleong. (2002), "Metodologi Penelitian Kualitatif", Remaja Rosdakarya, Bandung;
- Lilin Budiati, (2002), "Visi Bapedalda dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Kaitannya UU Nomor 22 tahun 1999" Bapedalda Kota Semarang, Semarang;
- Mike Robinson : "Towards a New Paradigm of Community Development"; Community Development Journal, Januari, 1995, Vol.30 No. 1;
- Otto Soemarwoto. (1991). "Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan". Djambatan. Jakarta;
- Rasna Warah ; "The Partnership Principle : Key to Implementing The Habitat Agenda: The United National Centre for Human Settlement", March, 1997, Vol.3, No.1;
- Retno Soetaryono, (1994), "Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan", Kemitraan Nasional dalam Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, Jakarta;
- Rudy C. Tarumingkeng, "Pembangunan Partisipatoris dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai", akaryam @ Yahoo.Com;
- Sarlito Wirawan Sarwono. (1992). "Psikologi Lingkungan". Grasindo. Jakarta.
- Sastra Wijaya. (1991). "Pencemaran Lingkungan". Rineka Cipta. Jakarta
- Soerjono Soekanto, (1987), "Sosiologi Suatu Pengantar", CV. Rajawali, Jakarta;
- Sondang P. Siagian. (2000). "Teori Pengembangan Organisasi". Bumi Aksara. Jakarta.
- Sudharto P. Hadi, (1998). "Monitoring Dan Evaluasi Aspek Sosial Ekonomi Suatu Proyek"; PPLH Universitas Diponegoro, Semarang;
- Sudharto P. Hadi, (1999). "Peranserta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Amdal"; PPLH Universitas Diponegoro, Semarang;
- Sudharto P. Hadi, (2001). "Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan"; Gadjah Mada University Press, Yogyakarta;
- Tukiman Taruna, (1997). "Pemiskinan dan Pengayaan Dalam Industrialisasi", Sebelas Maret University Press, Surakarta;

Y. Slamet, (1992), "Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi", Sebelas
Maret University Press, Surakarta;

Zulkarimen Nasution. (2002), "Komunikasi Pembangunan : Pengenalan Teori dan
Penerapannya", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Data

1. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah;
2. Bappedal Propinsi Jawa Tengah.
3. Bappedalda Kota Semarang